

FENOMENA KEMISKINAN
(Studi Kritis Atas Falsafah Hidup Orang Jawa)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
Konsentrasi Ilmu Ushuluddin



Oleh :

NUR SALAM

NIM : EO.13.98.009

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : U/2003/AF/019
K-2003	ASAL BUKU :
019	TANGGAL :
AF	

Filsafat kehidupan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT

2003

Persetujuan

Lampiran : 4 (Empat) Eks

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Ampel Surabaya
Di
Surabaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan, penelitian serta perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Salam

Nim : E0. 13. 98. 009

Jurusan : Aqidah Filsafat

Judul : FENOMENA KEMISKINAN (Studi Kritis Atas Falsafah Hidup
Orang Jawa)

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk memperoleh gelar sarjana SI dalam bidang Aqidah dan Filsafat pada fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Semoga skripsi ini dapat diterima dan mendapat pengesahan pihak fakultas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

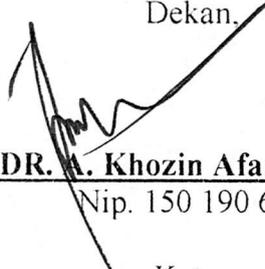


Drs. H. Muslih Fuadie, M. Ag.
Nip. 150/208 283

PENGESAHAN TIM PENGUJI

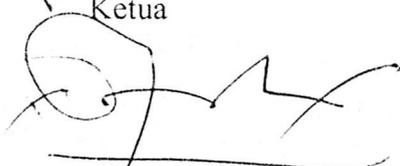
Surabaya, 21 Agustus 2003
Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri

Dekan.



DR. A. Khozin Afandi. M.A
Nip. 150 190 692

Ketua



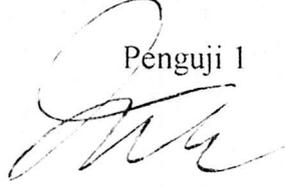
Drs. H. Muslih Fuadie. M. Ag
Nip. 150 208 283

Sekretaris



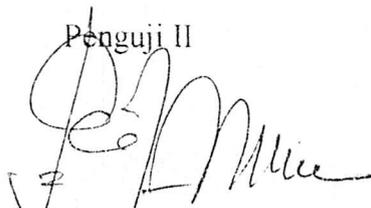
Dra. Anik Nurhayati M. Si
Nip. 150 273 562

Penguji I



Drs. H. Munawar Thohir
Nip. 150 177 929

Penguji II



Drs. Loekisno/Ch. W, M. Ag
Nip. 150 259 574

ABSTRAK

Skrripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan mengenai "FENOMENA KEMISKINAN " : (Studi Kritis Atas Falsafah Hidup Orang Jawa). Penelitian ini bertujuan untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan tentang "Fenomena Kemiskinan, terutama keterkaitannya dengan falsafah hidup orang jawa.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan hidup orang jawa merupakan pandangan yang didasarkan pada *makro-kosmos* dan *mikro-kosmos* serta di hiasi oleh mitos dan cerita-cerita mistik yang mengedepankan nilai-nilai keseimbangan, keserasian dan keharmonisan (tidak ada konflik). Nilai ini tercermin dalam ungkapan seperti, *nrimo ing pandum, aja ngaya aja ngangsa, sepi ing pamrih rame ing gawe* dll. Pandangan ini mencerminkan pandangan yang pasif dan tidak progresif. Akan tetapi pandangan hidup seperti itu bukanlah lahir secara kebetulan. Secara historis bahwa pandangan hidup ini diciptakan oleh penguasa (raja) melalui *mpu, pujangga* keraton telah memanipulasi kesadaran wong cilik (petani) dengan mengkultuskan dirinya sebagai wakil Tuhan (titisan dewa). Sehingga mengabdikan pada raja sama dengan mengabdikan pada Tuhan (dewa) oleh karena itu apa yang dilakukan oleh raja adalah sebuah kebenaran yang harus diterima meskipun raja melakukan penindasan sekalipun. Penguasa jawa (raja) juga menanamkan system nilai dan budaya yang searah dengan kepentingannya.

Seiring dengan penciptaan system nilai dan budaya yang hegemoni maka, penguasa jawa; entah raja, pemerintahan kolonial maupun pemerintah sekarang telah melakukan monopoli tanah dan menjadikan petani (wong cilik) sebagai obyek pengambilan upeti (pajak). Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tidak mencukupi. Akibatnya petani (wong cilik) termiskinkan.

Kemiskinan yang di alami oleh petani (wong cilik) terjadi karena akibat kurangnya atau minimnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik. Struktur ekonomi dan politik inilah yang menjadi dominan dalam terjadinya kemiskinan. Sedangkan pandangan hidup, sikap *nrimo, rila, sabar* dan budaya merupakan faktor pendukung dari pada terjadinya kemiskinan.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : KEMISKINAN DAN BUDAYA ORANG MISKIN	15
A. Tinjauan Umum dan Tinjauan Khusus Tentang Kemiskinan	15
1. Tinjauan Umum Kemiskinan	15
2. Tinjauan Khusus Kemiskinan	16
B. Kemiskinan di Indonesia	19
1. Geografis Indonesia	19
2. Sejarah Kemiskinan di Indonesia	21
a. Pada Zaman Kolonial (Abad – 19)	21

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Zaman Orde Lama.....	24
c. Zaman Orde Baru.....	26
3. Faktor yang Menyebabkan Munculnya Kemiskinan	
di Indonesia.....	29
a. Ekonomi.....	29
b. Politik.....	30
c. Pendidikan.....	30
C. Budaya Orang Miskin.....	31
BAB III : FALSAFAH HIDUP ORANG JAWA.....	36
A. Hakekat Pandangan Hidup.....	36
B. Masyarakat Jawa.....	41
C. Budaya Masyarakat Jawa.....	48
BAB IV : ANALISA FALSAFAH HIDUP ORANG JAWA DAN	
KEMISKINAN.....	58
A. Analisa Pandangan Hidup dan Budaya Masyarakat Jawa.....	59
B. Falsafah Hidup Orang Jawa dan Kemiskinan.....	66
C. Fenomena Kemiskinan Dalam Masyarakat Jawa.....	69
BAB V : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	75

Daftar Kepustakaan

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Pada garis besarnya, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan¹ atau boleh juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental dan fisiknya dalam kelompok tersebut.²

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia; walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh orang-orang yang bersangkutan³.

Kenyataan ini seringkali mengacu pada terbentuknya suatu budaya kemiskinan (*culture of poverty*) dalam masyarakat, yaitu suatu kondisi dimana orang-orang miskin hidup dalam suatu sub kultur; dan sebagai akibat adanya

¹ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. Xi.

² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 19.

³ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, hlm. x

kesamaan pengalaman, mereka memiliki sikap dan pola-pola tertentu yang diwariskan orang tua pada anak-anaknya.⁴

Budaya kemiskinan diperkenalkan oleh Oscar Lewis, seorang antropolog Amerika berdasarkan penelitiannya yang akurat dikalangan orang-orang Indian Amerika, di India, Kuba dan dengan orang-orang Puerto Rico baik di Puerto Rico maupun di New York City, tetapi karyanya yang paling terkenal adalah tentang Meksiko. Lewis pertama kali mengedepankan konsep tersebut dalam laporannya tentang kehidupan lima keluarga di Mexico City. Berdasarkan penelitiannya pada beberapa kebudayaan etnik, Lewis menemukan bahwa kemiskinan adalah salah satu sub-kultur masyarakat yang mempunyai kesamaan ciri antar etnik satu dengan etnik yang lainnya.⁵

Lewis menafsirkan sub-budaya kemiskinan sebagai suatu reaksi dan adaptasi terhadap posisi mereka dalam lapisan kelas, dan dalam masyarakat yang individualis dan kapitalistik. Adanya persamaan-persamaan antar etnik digunakan sebagai indikator bahwa kaum miskin sedikit sekali memiliki “ruang lingkup inovasi” disebabkan tekanan-tekanan yang mereka hadapi begitu kuat sehingga mempersempit kemungkinan-kemungkinan munculnya respons-respons dalam masyarakat.⁶

⁴ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid II*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm.19.

⁵ Alan Gilbert dan Josef Gugler, *Urbanisasi dan Kemiskinan di dunia ketiga*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm.177

⁶ Alan Gilbert dan Josef Gugler, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, hlm. 178

Oleh karena itu masalah kemiskinan tampaknya akan selalu menjadi tema sentral dalam pembicaraan mengenai pembangunan, khususnya di negara-negara Dunia Ketiga⁷, termasuk Indonesia. Di pulau Jawa sendiri yang *notabene* merupakan pusat pemerintahan dan menguasai kurang lebih 85 persen peredaran mata uang di Indonesia, ternyata penduduknya masih banyak yang berjuang untuk “menjadi miskin”, artinya masih banyak penduduk di pulau Jawa yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Kenyataan ini telah mendorong berbagai kalangan, terutama ilmuan sosial, untuk meneliti dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan serta memberikan alternatif solusinya melalui berbagai model pembangunan. Secara garis besar, kita dapat membagi teori-teori yang mencoba mengkaji dan menguraikan masalah kekayaan dan kemiskinan yang terdapat diantara bangsa-bangsa di dunia ini kedalam dua paradigma yang saling bersandingan. Kedua paradigma itu ialah Teori Modernisasi dan Teori Imperialisme. Kita dapat mengenali masing-masing pengikut kedua teori tersebut dari istilah-istilah yang dipergunakan. Misalnya, penganut teori modernisasi selalu mendengung-dengungkan istilah “modern”, “pembangunan”, “pertumbuhan ekonomi”, “deferensiasi Institusional”, dan “pembangunan nasional” (*nation*

⁷ Sekarang ini istilah *dunia ketiga* memang sudah ketinggalan jaman, terutama setelah perang dingin antara Dunia Pertama (blok kapitalis) dengan Dunia Kedua (blok sosialis) berakhir. Sebagaimana diketahui, dengan Dunia Ketiga dimaksudkan negara-negara yang tidak masuk kedalam kedua blok tersebut. Tetapi dalam perkembangannya, istilah ini lebih diartikan sebagai negara-negara yang secara ekonomi miskin atau negara-negara berkembang, tanpa melihat

building). Sebaliknya, para penganut teori Imperialisme senang menggunakan istilah “ketergantungan”, “eksploitasi”, “neokolonialisme”, dan “pembebasan”⁸.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan pembagian teori seperti yang dikemukakan Berger diatas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia menganut teori modernisasi dalam menentukan kebijakan pembangunannya. Ada dua sifat mendasar dari teori modernisasi ini, yaitu :

1. Teori ini sangat menekankan pada aspek psikologi (mentalitas individu) dan kebudayaan setempat sebagai penyebab terhambatnya pembangunan.
2. Mentalitas dan kebudayaan yang menjadi biang keladi hambatan ini adalah mentalitas dan kebudayaan tradisional, jadi yang berasal dari masyarakat itu sendiri⁹.

Dari dua sifat diatas tampak bahwa dalam teori modernisasi yang terpenting adalah mengubah mentalitas manusia, mengubah kebudayaan manusia dari kehidupan yang tradisional kepada yang modern. Karena pada dasarnya, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menurut teori ini, kemiskinan yang terjadi dinegara-negara dunia ketiga disebabkan oleh nilai-nilai kebudayaan yang hidup dalam masyarakat tidak memberikan dorongan untuk menciptakan etos kerja yang baik dalam masyarakat. Sekiranya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat diarahkan pada sikap

ideologinya. Dalam pengertian yang terakhir inilah istilah ini digunakan. Lihat : Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. ix..

⁸ Peter L. Berger, *Piramida Pengorbanan Manusia*, (Bandung : Iqra', 1982), hlm. 22-23.

⁹ A.E. Priyono dan Asmar Oemar Saleh, *Krisis Ilmu-ilmu sosial dalam Pembanguna di Dunia Ketiga*, (yogyakarta: PLP2M, 1984), hlm. 158.

positif terhadap pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan dalam masyarakat tersebut akan terlaksana dengan baik¹⁰.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Niels Mulder mendefinisikan falsafah hidup sebagai suatu abstraksi dari pengalaman hidup yang dibentuk oleh suatu cara berpikir dan cara merasakan tentang nilai-nilai, organisasi sosial, kelakuan, peristiwa-peristiwa dan segi-segi lain dari pada pengalaman; falsafah hidup merupakan sebuah pengaturan mental dari pengalaman itu dan pada gilirannya mengembangkan sikap terhadap hidup.¹¹ Dengan mendasarkan pada teori modernisasi tersebut diatas, banyak ilmuan sosial maupun pengambil kebijakan pembangunan di negeri ini yang mengklaim bahwa pandangan hidup orang Jawa menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan. Hal ini didasarkan pada falsafah hidup orang Jawa yang menurut mereka-penuh dengan *kelembutan* sekaligus *kelambatan*, seperti yang tercermin dalam ungkapan-ungkapan Jawa yang cukup kuat mengakar dalam masyarakat, misalnya : *alon-alon waton kelakon, mangan ora mangan kumpul, ono dino ono upo*, dan lain-lain.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam membicarakan kelemahan-kelemahan mentalitas orang Jawa dalam pembangunan, kita tidak bisa lepas dari konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, dan sikap mental orang Jawa terhadap lingkungannya, yang sudah lama mengendap dalam alam pikiran mereka, karena terpengaruh atau bersumber

¹⁰ Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, hlm.37.

¹¹ Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1973), hlm.35



pada nilai-budaya yang telah ada sejak beberapa generasi sebelumnya¹². Dalam pandangan Kluckhohn, semua sistem nilai-budaya dalam semua kebudayaan di dunia ini berkenaan dengan lima masalah pokok dalam kehidupan. Kelima masalah pokok itu adalah :

1. Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia.
2. Masalah mengenai hakekat dari karya manusia.
3. Masalah mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu
4. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
5. Masalah mengenai hakekat hubungan manusia dengan sesamanya¹³.

Apabila kita mengkaji pandangan orang Jawa terhadap kelima masalah pokok diatas, maka akan diperoleh gambaran tentang mentalitas orang Jawa dan pandangan hidupnya, sebab sistem nilai-budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi kelakuan manusia.

Suatu kelemahan dari mentalitas orang Jawa yang dianggap sebagai faktor yang menghambat proses pembangunan adalah sikapnya yang pasif terhadap hidup, kesukaan orang Jawa terhadap gerakan-gerakan kebatinan, penilaian yang tinggi yang dinyatakan dalam kosep *nrimo*, ketabahannya yang ulet dalam

¹² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 37-38.

¹³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, hlm. 28

menderita, tetapi lemah dalam hal karya, merefleksikan mentalitas tersebut diatas¹⁴.

Mentalitas tersebut merupakan konsekuensi dari pandangan hidup orang jawa yang didasarkan pada konsep *jagad gedhe- jagad cilik*, dimana dalam pandangan orang jawa, model *jagad- gedhe* (kosmos) dianggap sebagai paradigma bagi manusia selaku *jagad- cilik* (mikrokosmos)¹⁵. Konsep ini juga mengandaikan bahwa tatanan kehidupan sosial merupakan suatu tatanan yang telah baku karena merupakan bagian dari tertib alam seluruhnya, yang bersifat misterius sebagaimana tampak dalam beberapa aspeknya yang bersifat teratur dan tidak berubah-ubah¹⁶. Oleh karena itu, keteraturan merupakan kondisi yang harus ditegakkan. Keteraturan berarti *harmoni* dengan kosmos, dan dalam arti yang terdalam inilah terjadi kemanunggalan, kesatuan dari segala-galanya, pencipta dengan yang diciptakan, *kawula* dengan *gusti*, *sangkan- paran*¹⁷.

Dari penjelasan singkat mengenai pandangan hidup orang jawa diatas, kiranya sangat logis kalau sebagian ilmuwan sosial dan pengambil kebijakan pembangunan, yang sangat dipengaruhi oleh teori modernisasi¹⁸, mengklaim bahwa pandangan hidup orang jawalah yang menjadi faktor penyebab kemiskinan

¹⁴ Koentjaraningrat, *manusia dan kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 350

¹⁵ Niels Mulder, *Kebatinan dan Kehidupan Sehari-hari Orang Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1983), hlm. 14.

¹⁶ Nat. J Colleta dan Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm.57.

¹⁷ Niels Mulder, *Kebatinan dan Kehidupan Sehari-hari Orang Jawa*. hlm.15

bahkan telah memunculkan budaya kemiskinan dalam masyarakat. Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Jawa benar-benar disebabkan oleh falsafahnya (pandangan terhadap hidup) mereka atau factor lainnya, yaitu, kemiskinan disebabkan akibat tidak adanya kesempatan atau peluang yang memungkinkan mereka untuk maju.

B. Penegasan Judul

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap penulisan skripsi yang berjudul : FENOMENA KEMISKINAN (Studi Kritis Atas Falsafah Hidup Orang Jawa), maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan judul agar tidak terjadi salah penafsiran;

FENOMENA KEMISKINAN : Penampakan realitas dalam suatu fakta dan gejala - gejala kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dengan di ukur melalui; tidak berharta (hartanya tidak mencukupi kebutuhannya); serba kekurangan.

FALSAFAH HIDUP : Anggapan, gagasan dan sikap batin paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat.

ORANG JAWA : Penduduk asli bagian tengah dan timur pulau Jawa yang berbahasa Jawa.

¹⁸ A.E. Priyono dan Asmar Oemar Saleh, *Krisis Ilmu- ilmu Sosial dalam Pembangunan Dunia Ketiga*, hlm. 159

Jadi maksud dari judul di atas adalah, Fenomena Kemiskinan yang di pandang dan ditinjau dari perspektif Falsafah Hidup Orang Jawa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Perumusan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini, dengan mendasarkan pada latar belakang masalah diatas, kiranya dapatlah dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sebenarnya falsafah hidup orang jawa ?.
2. Apakah kemiskinan yang dialami orang jawa disebabkan karena falsafah hidupnya atau faktor lainnya..

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui falsafah hidup orang jawa.
2. Memahami konsep kemiskinan dalam masyarakat.
3. Mengetahui apakah benar pandangan hidup orang jawa memiliki keterkaitan dengan fenomena munculnya budaya kemiskinan dalam masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, setidaknya terdapat empat konsep dasar yang mendapat perhatian dominan, yaitu : pandangan hidup orang jawa, etos kerja, kemiskinan, serta budaya kemiskinan.

Niels Mulder, dalam bukunya *Kepribadian jawa dan Pembangunan Nasional*, menyatakan bahwa pandangan hidup merupakan suatu pengaturan mental dari pengalaman hidup yang pada gilirannya mengembangkan sikap

terhadap hidup (Niels Mulder, 1973:35). Untuk mengetahui pandangan hidup suatu kelompok masyarakat dapat dilihat dari sistem nilai-budaya masyarakat tersebut (Koentjaraningrat, 1992 :37-38).

Dengan menelusuri sistem nilai budaya jawa, pemerintah menilai bahwa pandangan hidup masyarakat jawa, khususnya sikap terhadap hidup, tidak sesuai dengan jiwa pembangunan dan merupakan faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan sendiri dalam pandangan pemerintah merupakan masalah budaya, dimana orang menjadi miskin kerana budayanya yang pasif dalam menghadapi kehidupan (Awan Setya Dewanta, 1995:19). Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlu untuk mengganti nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai modern.

Dalam bukunya *Berfilsafat dari konteks*, Magnis-Suseno menguraikan pandangannya tentang etos kerja, bahwa mula-mula etos kerja merupakan istilah deskriptif, tetapi karena dalam melakukan pekerjaan kita mengharapkan bahkan menuntut adanya sikap tertentu dan menilai sikap tertentu lainnya sebagai sesuatu yang tidak memadai, maka istilah ini juga mendapat arti normatif sebagai sikap yang dituntut agar dikembangkan (Franz Magnis Suseno, 1992:121).

Adapun konsep budaya kemiskinan sendiri diperkenalkan oleh Oscar Lewis dalam laporannya tentang kehidupan lima keluarga di Mexico city pada tahun 1970 (Alan Gilbert dan Josef Gugler, 1996:117). Budaya kemiskinan merupakan suatu bentuk adaptasi kultural terhadap status kehidupan ekonomi

yang terbatas, yang meliputi pola-pola kelakuan dan sikap dalam mempertahankan eksistensi kelompok (Ernayati dan Ita Novita, 1996:5).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian ini mencoba untuk melihat korelasi antara pandangan hidup orang Jawa dengan fenomena kemiskinan. Sikap hidup orang Jawa, dalam masyarakat yang oleh sebagian pihak diklaim telah melahirkan suatu fenomena kemiskinan dalam masyarakat. Penelitian mengenai pandangan hidup orang Jawa, sikap hidup orang Jawa dan kemiskinan tampaknya sudah cukup banyak, tetapi mayoritas membahasnya secara terpisah seperti penelitian yang dilakukan oleh Ernayati dkk, yang hanya memaparkan gejala budaya kemiskinan di desa tertinggal di DIY tanpa mengupas lebih jauh mengenai pandangan hidup orang Jawa, dan mencoba mencari keterkaitannya.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya metode penelitian merupakan cara bagaimana peneliti sampai tujuan, yaitu untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kegunaan metode sangatlah penting, karena berhasil atau tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh pemilihan metode yang tepat.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif yang biasa digunakan penelitian ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan fenomena kemasyarakatan. Metode penelitian deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah

penelitian dengan memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh¹⁹.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun ciri-ciri pokok dari metode penelitian deskriptif ini adalah :

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah- masalah yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang adekuat.
3. Eksplanasi merupakan penjelasan dari rangkaian data-data yang diperoleh dalam penulisan karya ilmiah, setelah dilakukan kritik intern dan ekstern dari suatu sumber data²⁰.

Dalam penelitian ini, obyek yang akan dideskripsikan adalah falsafah hidup orang jawa, terutama masalah sikap orang jawa terhadap realitas kehidupannya yang seringkali dipandang tidak sesuai dengan jiwa atau semangat pembangunan. Disamping itu juga masalah fenomena kemiskinan yang ada di masyarakat pada umumnya dan orang jawa pada khususnya.

Disini penulis menyadari bahwa metode penelitian sebagai prosedur pemecahan masalah tidak akan dapat berfungsi apabila tidak didukung oleh ketersediaan data yang memadai. Untuk menghimpun data agar masalah penelitian dapat dipecahkan diperlukan penggunaan teknik dan alat (instrumen)

¹⁹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm.67.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1990), hlm. 64

yang baik, tepat, dan benar. Oleh karena itu, untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan teknik atau studi literatur untuk menghimpun data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Teknik atau studi literatur sendiri merupakan cara menghimpun data yang dilakukan melalui bahan-bahan tertulis, seperti: buku- buku, koran, majalah dan yang sejenisnya.

Selain itu, untuk mengolah data yang sudah dihimpun diperlukan suatu pendekatan atau sudut pandang dalam memahami obyek penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi-struktural kritik untuk melihat fenomena kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat jawa dan faktor penyebabnya. Secara teoritis, pendekatan sosiologi sendiri digunakan untuk menelaah proses-proses sosial tertentu, aneka hubungan dan kompleksitas yang mendorong kemajuan budaya manusia berdasarkan perubahan pada perilaku kemasyarakatan²¹.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan secara konkrit dan sistematis dalam skripsi ini maka perlu disusun bab demi bab yang saling berkaitan sehingga diperoleh kebetulan konsep dan pengertian secara menyeluruh. Untuk selanjutnya dalam pembahasan ini penulis susun sebagai berikut :

²¹ N. Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.7

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari; Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Konsep kemiskinan secara umum dan masalah substansi kemiskinan di Indonesia serta konsep tentang budaya kemiskinan, yang terdiri dari tinjauan umum dan khusus tentang kemiskinan, kemiskinan di Indonesia, budaya orang miskin.

BAB III : Falsafah hidup orang jawa, yang terdiri dari hakekat pandangan hidup, masyarakat jawa, budaya masyarakat jawa.

BAB IV : Korelasi atau keterkaitan antara pandangan hidup orang jawa dengan fenomena kemiskinan dalam masyarakat jawa, yang terdiri dari pandangan hidup orang jawa dan budaya masyarakat jawa, pandangan hidup orang jawa dan kemiskinan, fenomena kemiskinan dalam masyarakat jawa.

BAB V : Penutup yang berisi, kesimpulan dan saran.

BAB II

KEMISKINAN DAN BUDAYA ORANG MISKIN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Tinjauan Umum Dan Tinjauan Khusus Tentang Kemiskinan

1. Tinjauan Umum Kemiskinan.

Kemisikinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Dewasa ini, kemiskinan telah menjadi isu sosial sekaligus isu politik yang banyak di bicarakan oleh berbagai kalangan, baik kaum politisi maupun cendekiawan. Tetapi jawaban atas pertanyaan apa itu kemiskinan, masih simpang siur. Antara ahli yang satu dengan ahli yang lain telah melukiskan masalah ini secara berbeda- beda. **Sar A. Levitan**, misalnya mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang- barang dan pelayanan- pelayanan yang di butuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut **Bredley R. Schiller**, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksanggupan untuk mendatangkan barang – barang dan pelayanan – pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dan dengan nada yang sama Emil Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Ala, 1981)¹. Sedangkan kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam satu paket barang dan jasa yang diperlukan setiap orang untuk bisa hidup secara

¹ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1966), hlm. 1

manusiawi. Paket ini terdiri dari komposisi pangan bernilai gizi cukup dengan nilai protein dan kalori yang sesuai dengan tingkat usia, jenis kelamin, sifat pekerjaan, keadaan iklim lingkungan yang dialaminya.² Adapun **Jhon Lewis Gillin** mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan dimana seseorang, karena pendapatannya yang tidak mencukupi atau biaya hidup yang tidak wajar, tidak dapat memelihara standar kehidupan yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental bagi dirinya dan untuk memberikan kesempatan baginya dan ketergantungannya secara alamiah dan fungsi yang bermanfaat sesuai dengan standar dari masyarakat dimana ia menjadi anggotanya.³ Meskipun definisi mengenai kemiskinan sangat bervariasi, namun pada hakekatnya, seseorang digolongkan miskin jika keadaannya menyebabkan ia tidak mampu mentaati tata nilai dan norma-norma yang di junjung tinggi oleh masyarakatnya. Pandangan filosofis yang demikian menunjukkan begitu luasnya rentang dimensi kemiskinan.⁴

2. Tinjauan Khusus Kemiskinan

Karena begitu luasnya rentang dimensi kemiskinan, maka tiap-tiap disiplin ilmu pengetahuan memiliki pandangan yang berbeda tentang kemiskinan. Yang mencakup bidang ekonomi sosial maupun budaya, maka diperlukan satu pembahasan tentang kemiskinan yang lebih khusus dalam

² Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan Dan Pemerataan Pendapatan*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984), hlm. 41

³ John Lewis Gillin, et. al., *Social Problems (fourth edition)*, (New York: Apleton – Country – Crafts, Inc., 1952), hlm. 398



perspektif ekonomi dimana tinjauan tentang kemiskinan lebih ditekankan pada parameter – parameter yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam persolaan ini, kemiskinan secara ekonomi juga dipahami sebagai proses dimana kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakatnya.⁵

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain- lain.

Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok bisa dipengaruhi oleh persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan, oleh posisi manusia dalam lingkungan sekitarnya dan oleh kebutuhan obyektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi.⁶ Artinya kemiskinan lebih menunjuk kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakat yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah. Mereka tetap miskin atau menjadi miskin bukan karena atidak mau berusaha memperbaiki nasibnya, tetapi karena usaha yang mereka lakukan

⁴ M . T . Felix Sitorus, *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan*, (Jakarta: Grasindo. 1996). hlm. 46

⁵ H.S. Dillon, Hermanto, *Mengentaskan Kemiskinan; Membangun Pertanian*, dalam Prisma. (Jakarta: LP3 ES, 1993) hlm. 19

⁶ Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, (Jakarta: Inti Idayu Press. 1984), hlm. 41

selalu kandas dan terbentur pada sistem atau struktur masyarakat yang berlaku.

Yang ini di sebut kemiskinan Struktural.⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dipandang dari sudut ekonomi ada dua jenis kemiskinan: Pertama kemiskinan relatif, yakni yang dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan klas pendapatan tertentu dibanding dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan klas pendapatan lainnya. Menurut kriteria Bank Dunia : (1) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasional, maka disebut pembagian pendapatan nasional yang sangat timpang, (2) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12 – 17% dari pendapatan nasional maka disebut ketidak merataan sedang, dan (3) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari pendapatan nasional, maka disebut ketidak merataan rendah. Kedua: kemiskinan absolut, yakni suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti: sandang, pangan, pemukiman, dan pendidikan. Menurut kriteria Biro Pusat Statistik (BPS) dengan menghitung pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi berdasarkan data Survei Sosial – Ekonomi Nasional (SUSENAS) ditetapkan pada batas garis kemiskinan absolut adalah setara dengan tingkat pendapatan yang

⁷ Johannes Mardimin, *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Kanisius, 1996). hlm. 24

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 2.100 kalori per orang di tambah dengan beberapa kebutuhan non – makanan lainnya, seperti sandang, papan, jasa, dan lain-lain. (Mas' oed, 1994:137).

Batasan kemiskinan menurut Sajogyo adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standart kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Menurut Sajogyo, seseorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu memperoleh penghasilan per kapita setara 320 kilogram beras untuk daerah pedesaan, atau 480 kg beras untuk penduduk di perkotaan.⁸

B. Kemiskinan Di Indonesia.

1. Geografis Indonesia

Indonesia adalah negeri kepulauan. Lebih dari 3000 pulau berjejer dari Barat sampai ke Timur. Jarak antara ujung Barat dengan Ujung Timur sama dengan jarak antara pantai Barat dan pantai Timur Amerika Serikat atau antara Inggris dan Kaukasia. Negeri kepulauan ini demikian indahnya sehingga bisa dikatakan laksana untaian zamrud yang melingkari katulistiwa.

Luas daratannya hampir 2 juta kilometer persegi. Bisa disamakan dengan 57 kali negeri Belanda, 3 kali negeri Jepang atau 3½ kali negeri

⁸ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan*, hlm. 2

Perancis. Lima pulau terbesar adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Tiga lautan besar mengelilingi negeri ini : Samudera Pasifik, Samudera India dan Lautan Tiongkok Selatan. Indonesia adalah mata – rantai yang menghubungkan benua Australia dengan Benua Asia. Dipandang dari segi geografi ini saja, Indonesia merupakan daerah yang sangat penting dalam lalu lintas dunia.

Negeri kepulauan ini juga dikenal sangat subur. Sejak dahulu kala perladangan dan persawahan dikenal dan maju. Di dalam bumi Indonesia terdapat bahan pelikan. Dari timah sampai emas, dari maugan sampai batu bara, dari bauksit sampai minyak bumi dan gas alam serta uranium. Diyakini dimasa akan datang ditemukan berbagai macam pelikan lainnya yang sangat berharga.

Semestinya kekayaan alam yang melimpah ruah itu membuat rakyat makmur dan berbahagia. Tetapi sampai hari ini sebaliknya yang terjadi masyarakat indonesia sebagian besar hidupnya masih miskin dan sengsara ditengah – tengah kekayaan alam yang tak ada taranya itu.

Pada tahun 1955, jumlah penduduk Indonesia adalah 84 juta sedangkan pada sensus terakhir (2000) telah mencapai 201. 641. 570 jiwa. 59,19 persennya berada di pulau Jawa, 20,97 % di pulau Sumatera, 7,10 % di Kalimantan dan 7,10 % di Sulawesi. Pulau Jawa adalah yang terpadat

penduduknya, yaitu 106 orang per kilometer persegi, sedangkan Sumatera 86 orang, Sulawesi 75, Kalimantan 20 orang.

Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, mulai yang berjumlah puluhan juta sampai yang hanya beberapa ribu. Suku bangsa Jawa adalah suku bangsa yang terbesar (45%), Sunda (14%), Madura (8%), Melayu pesisir (8%), Makasar/ Bugis (4%), Minangkabau (3%), Bali (2%), Batak (2%), Aceh (1%), dan banyak lainnya lagi. Jumlah suku bangsa seluruhnya lebih dari seratus. Sedangkan tingkat kebudayaan dari berbagai suku bangsa tersebut tidaklah sama, tetapi semuanya mempunyai sejarah yang panjang.⁹

Dilihat dari potensi sumber daya alamnya Indonesia adalah negara yang paling komplis. Bahkan sampai ada yang mengatakan kalau Indonesia adalah surganya dunia. Tetapi mengapa dari dulu sampai sekarang kemiskinan di Indonesia tidak pernah teratasi, bahkan semakin banyak orang yang miskin dari waktu ke waktu. Ini bisa kita lihat pada banyaknya PHK, meningkatnya pengangguran, harga komoditas pertanian yang turun dll. Yang semuanya ini memicu terjadinya kemiskinan di Indonesia.

2. Sejarah Kemiskinan di Indonesia

a. Pada Zaman Kolonial (abad – 19)

⁹ Darsono, *Jalan Revolusi: Materi Study*, (Jakarta: Jajasan Pembaruan, tt), hlm. 1-2

Abad ini adalah abad yang paling revolusioner dan penuh perubahan dalam sejarah kepulauan yang saat ini di kenal Indonesia. di awal abad itu konsep negara – kolonial – Hindia – Belanda di siapkan oleh Herman Willem Deandels (1808 – 1811) seorang pengagum revolusi Prancis untuk mempertegas pengelolaan wilayah kolonial di Indonesia yang sebelumnya hanya merupakan mitra perdagangan VOC (Verenigde Oost Indesche Compagnie) di abad itu pula struktur kapitalistik terbentuk. Lembaga keuangan Nederlandsche / handels / Maaatshapij (NHM) dan Javasche Bank didirikan. Tampil pengusaha – pengusaha eropa mengelola industri perkebunan dan pabrik – pabrik sementara kaum bumi putra dijadikan menjadi buruh.

Pada pemerintahan Thomas Stamford Raffles (1811 – 1816) telah diletakkan dasar – dasar yang penting bagi perubahan yang mendasar di Jawa dia memerintahkan pengambil-alihan seluruh tanah di Jawa menjadi milik negara (domain). Bagi dia tidak ada pemilikan tanah secara pribadi di dalam masyarakat bumi putra.

Pada masa Van den Bosch konsep yang diambil Raflesh untuk menindas rakyat di rubah tanah dikembalikan kepada rakyat bumi putra namun pengembalian tanah – tanah tersebut disertai dengan beban yakni

setiap petani yang mendapat atau menguasai tanah wajib menanami tanah tersebut dengan tanaman dagang konsumen dunia atau

menyediakan diri untuk bekerja selama 66 hari pada *onderneming-onderneming* pemerintah.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Desakan politik etis yang dinyatakan orang-orang liberal pada belahan kedua abad ke-19 tetap saja tak mampu mengangkat kondisi rakyat bumi putra. Laporan Komisi Pemerintah dari tahun 1880 (*minderweltaarts Commissie*) menyatakan bahwa sekalipun hasil ekspor komoditas pertanian yang dinikmati para pengusaha kolonial (supra struktur yang berafiliasi pada pemerintah) pada waktu itu meningkat, akan tetapi kemakmuran penduduk pribumi (warga pemeran di Infra struktur) justru menurun, dan bahkan bertaraf lebih rendah dari semasa dilaksanakannya *culture stelsel*.¹¹ Ini terjadi karena adanya ekspansi kapital yang berlebih-lebihan (besar), sehingga mendominasi tanah-tanah milik petani, yang berakibat akses petani terhadap sumber daya produksi tersebut menurun. pada gilirannya hanya dapat mengandalkan tenaga kerjanya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

untuk dijual dalam rangka mendapatkan upah kerja guna memenuhi kebutuhan pokok.

Untuk meredam perlawanan rakyat bumi putra dan menjaga kepentingan ekonomi dan politik kolonial dibuatlah peraturan – peraturan yang bertujuan membatasi atau bahkan mematikan gerakan rakyat bumi putra untuk menuntut kemerdekaanya. Misalnya dua artikel No.153 bis dan

¹⁰ Edy Cahyono, *Buruh Dari Masa Ke Masa*, (Yogyakarta: Lapera, 1987), hlm. 1-2

153 ter dalem w.v.s yang di undangkan oleh raja Belanda. Barang siapa jang sengadja melahierkan dengan perkataan, toeliesan atau gambar, jang bermaksoed, baik sindiran, baik tengah – tengah atau bisa di doega – doega mengganggu ketentraman oemoem, baik berkehendak setoedjoe dengan angan-angan mendjatoehkan atau menjerang dari kekoesaan di negeri belanda atau indonesia akan di hoekoem dengan hoekoeman pendjara setinggi – setingginya enam tahun atau denda oeang setingginya tiga ratoes roepiah.¹²

Secara sederhana dapat kita nyatakan bahwa pada zaman kolonial, di Indonersia tidak ada orang yang tidak miskin. Kebanyakan rakyat Indonesia dipaksa bekerja pada belanda dengan kesejahteraan yang sangat minim. Mereka dikasih makan, sandang dan papan seadanya tanpa melihat kelayakan. Tanah yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat Indonesia dirampas untuk memperkaya kolonial belanda, walaupun ada sebagian kecil rakyat Indonesia yang menanam itupun atas perintah belanda dan tanamannya yang ditanam harus diserahkan kepada belanda dengan harga yang sangat murah. Makannya tak heran kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang membangun negeri belanda adalah orang Indonesia.

b. Zaman Orde Lama

¹¹ Bagong Suyanto (ed), *Perangkap Kemiskinan : Problem dan Strategi Pengentasannya*, cet I, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), hlm. 60-61

¹² Cahyono, *Buruh*, hal. 5

memperoleh pengakuan bukan hanya sebagai administrator masalah – masalah keamanan tapi juga peran politik yang utama.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hubungan persaingan diantara ketiga kekuatan politik utama tersebut menyedot sebagian besar tenaga, sumber dan perhatian. Sehingga Banyak masalah yang seharusnya diselesaikan lebih dulu menjadi terabaikan begitu saja. Dan buntutnya kondisi seperti itu menimbulkan krisis politik dan ekonomi yang memuncak pada kudeta 30 september 65. Angka inflasi yang tringgi, kemacetan produksi, kelangkaan barang dan melambungnya harga barang menjadikan rakyat hidup dalam keadaan yang serba kekurangan.

Pemerintahan yang sering silih berganti kabinetnya 1950 – 1959 terdapat tujuh pemerintahan dan tidak ada yang berumur lebih dari dua tahun belum mampu menghancurkan struktur ekonomi dan politik yang dibangun pada masa kolonial. Petani masih banyak yang tidak punya lahan, buruh tidak bisa bekerja karena tidak berproduksi membuat rakyat Indonesia belum merasakan kemerdekaanya.

c. Orde Baru

Penghancuran Gerakan Komunis oleh militer di tahun 1965 – 1966 mendapat respon yang positif dari negeri-negeri imperialis. Tahun 1967

¹³ Mohtar Mas' oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 19

dalam pertemuan Paris Meeting beranggotakan : Jepang, Jerman Barat, Australia, AS, Prancis, Italia, Nederland, Inggris, Swiss, Dan selandia baru dilakukan penjadwalan hutang Indonesia sebesar UUS 2,4 milyar yang ditunda pembayarannya sampai pada tahun 1979. Pada 10 januari pemerintah menerapkan berlakunya UU No 1 / 67 tentang penanaman modal asing. Sedangkan sebagai kelanjutannya pertemuan Tokyo pada bulan september 66 di Australia pada tanggal 23 - 24 Pebruari 67 diselenggarakan pertemuan untuk membentuk sebuah badan pemberi pinjaman yang dikenal dengan IGGI. Dan disepakati bantuan sebesar UUS 325 juta kepada Indonesia.¹⁴

Dukungan cukup besar dari pemerintahan negara non komunis dan masyarakat bisnis Internasional tersebut pada umumnya memungkinkan pemerintahan Indonesia untuk mencapai salah satu tujuan stabilitas yaitu pengendalian inflasi, kenaikan harga telah berkurang sampai pada harga yang wajar pada awal 1969, neraca pembayaran yang defisit dapat dibayar dengan memakai bantuan asing dan peningkatan ekspor. Ini berarti pembangunan ekonomi Orde Baru mengandalkan kekuatan ekonomi luar negeri melalui pinjaman, investasi dan hibah (bantuan) bukan didasarkan pada kekuatan ekonomi nasional.

Pembangunan Ekonomi dan politik yang dilakukan oleh Orde Baru menyisakan banyak sekali persoalan yang dihadapi rakyat. Pengangguran

¹⁴ Cahyono, *Buruh*, hlm. 13

yang merajalela, Pada tahun 66 hanya 10 % dari 40 juta angkatan kerja yang terlibat dalam berbagai macam pekerjaan industri. Pada awal 67 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diperkirakan antara 3 – 4 juta orang tidak bekerja di perkotaan, sedangkan dipedesaan sekitar antara 12 – 14 juta orang setengah menganggur atau menganggur sama sekali. Ini hampir separoh dari angkatan kerja menganggur atau setengah menganggur.¹⁵

Menjelang runtuhnya soeharto ada beberapa kejadian yang cukup menarik yang hampir sama dengan detik-detik runtuhnya soekarno. Dimana kejadian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan ekonomi luar negeri sama sekali tidak punya kekuatan yang mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Tahun 1997 bular juli adalah awal krisis ekonomi dan moneter. Kurs Dollar mencapai Rp. 3845 / US, harga kebutuhan pokok terus naik, jumlah pengangguran Industri mencapai 14 juta. Rakyat semakin terjerat dengan harga kebutuhan pokok karena krisis nasional. Kurs Rupiah sampai 11.000 pada bulan mei. Perlawanan yang disertai penjarahan terjadi dimana-mana dan akhirnya Soeharto Turun.

¹⁵ Mas'ood, *Ekonomi*, hlm. 111 – 114

3. Faktor yang Menyebabkan Munculnya Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia dari zaman kolonial sampai sekarang di pengaruhi oleh tiga faktor yang menentukan yaitu ekonomi, politik dan pendidikan.

a. Ekonomi

Kemiskinan yang terjadi di pedesaan dan dialami oleh buruh, tani ataupun petani kecil lebih disebabkan minimnya akses mereka dalam memiliki tanah (alat produksi). Dalam pemilikan tanah di Indonesia telah terjadi pemilikan lahan secara besar – besaran atau terkonsentrasi pada beberapa pengusaha, real estate, industrial estate serta pengusaha perkebunan dan kehutanan di satu pihak, sementara di pihak lain banyak petani gurem dan masyarakat perkampungan yang tinggal di daerah kumuh, sedangkan kemiskinan yang ada di perkotaan lebih banyak disebabkan minimnya upah yang diberikan majikan kepada buruh sehingga besarnya upah sangat jauh dari pemenuhan kebutuhan hidup buruh.¹⁶

Penggunaan konsep Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) dengan perinciannya yang berdasarkan standar hidup buruh tahun 1950, merupakan indikasi dari rendahnya itikad memperbaiki upah buruh.¹⁷ Banyaknya PHK yang akhir – akhir ini sering kali terjadi membuat jumlah pedagang kaki lima semakin meningkat dan inipun harus disingkirkan oleh

¹⁶ Bagong (ed), *Perangkap Kemiskinan*, hlm 24

¹⁷ Agung Wibawanto (eds), *Siasat Buruh Dibawah Represi*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1998), hlm. 135

pemerintah dengan alasan yang tidak rasional yaitu mengganggu keindahan kota dll.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Politik

Faktor politik tidak begitu punya pengaruh secara langsung dalam lahirnya dan berkembangnya proses kemiskinan yang terjadi di Indonesia akan tetapi faktor politik ini mempengaruhi seberapa jauh kemiskinan itu akan berkembang. Misalnya pada pemerintahan orde baru, menurut Bamun sejak tahun 1970 – an di jelaskan bahwa kiprah partai politik hilang dari pedesaan ketika program depolitisasi alias floating mass dilaksanakan oleh orde baru dan pembentukan kelembagaan dilakukan oleh Orde Baru seperti, LKMD, LMD, dan PKK. Lembaga tersebut tidak hanya berpihak kepada Golkar tetapi lembaga tersebut juga tidak memiliki komitmen sosial dan kepentingan politik untuk memperjuangkan nasib orang miskin.

c. Pendidikan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam faktor ini bisa kita lihat pada fenomena yang terjadi dalam masyarakat bahwa masih banyak penduduk yang berpendidikan rendah atau di bawah SD, di mana pada tahun 1980 masih berjumlah 85,1 % dan pada tahun 1990 turun tinggal 70 % dan ini mengakibatkan rendahnya kualitas SDM di Indonesia dibanding dengan negara lain. Dan saat inipun mulai di pertanyakan efektifitas sistem pendidikan yang berlaku di negara kita sebagai wahana untuk pemberantasan kemiskinan. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa pendidikan dan sistem pendidikan kita baik dari sudut isi

maupun pelaksanaannya semakin lama semakin tidak relevan dan mahal bagi pemecahan kemiskinan.¹⁸

C. Budaya Orang Miskin

Budaya merupakan manifestasi dari suatu kelompok dalam masyarakat untuk menghadapi waktu, peluang, kesinambungan dan perubahan yakni sejarah. Dengan demikian, dalam kondisi sosial – budaya yang berbeda maka akan berlainan pula bentuk manifestasinya.

Bagi orang Jawa umpamanya orang miskin di tandai oleh indikasi sebagai berikut : (1) rumah yang reyot; (2) tidak memiliki pakaian yang cukup istilah lokal adalah tidak memiliki “ klambi resikan “ atau baju yang cukup baik untuk menghadiri pertemuan ; (3) tidak memiliki pekerjaan yang tetap; (4) tidak memiliki persediaan pangan, dan (5) tidak memiliki tanah atau ternak besar. Akan tetapi ketika di Aceh memiliki indikator yang berbeda¹⁹

Dalam kondisi diatas maka dapat digambarkan bahwa orang miskin dalam membentuk kebudayaannya dipengaruhi oleh kondisi struktur masyarakatnya. Artinya, berdaya atau tidaknya suatu kelompok miskin dalam kehidupan masyarakatnya itu pada kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan – determinan sosial budayanya (seperti misalnya posisi, status dan wawasan yang di punyainya) dan sebaliknya, semua fasilitas sosial budaya yang

¹⁸ Loekman Soetrisne, *Kemiskinan, Perempuan Dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm 25

¹⁹ Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, hlm. 40

teraih dan dapat di daya gunakan olehnya itu akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya orang tak akan dapat belajar atau membiayai belajar anak – anaknya guna menyerap ilmu dan kiat hidup mereka yang tak miskin. Tak urung, keluarga – keluarga miskin akan selalu ketinggalan saja kalau harus berebut dan merebut status. Mereka akan terpasung terus pada posisi – posisi dan status – status sosial – ekonomi yang rendah – rendah saja, dan berkeadaan begitu mereka sulit untuk dapat terdedah secara cukup kepada wawasan – wawasan yang dapat mengentas dan mendinamisasi dirinya.²⁰

Kebijakan ekonomi yang melahirkan implikasi kesenjangan sosial yang melebar, yang membuat bagian besar penduduk yang berada di piramida bawah menjadi termiskinkan. Proses pemiskinan ini pada gilirannya bukan saja melahirkan masyarakat yang miskin secara ekonomi tetapi juga lemah secara politik, bahkan miskin secara budaya. Proses ini dalam kadar tertentu telah melahirkan mentalitas masyarakat atau kekuatan – kekuatan sosial yang serba dicekam kekhawatiran, kegamangan, dan ketakutan di tengah kekuatan besar negara (pemerintah) yang semakin dominan dalam menentukan kebijakan. Yang pada perkembangan berikutnya akan melahirkan budaya birokrasi yang bersifat mapan dalam kehidupan masyarakat luas. Birokrasi yang semula merupakan badan administratif negara atau pemerintahan dengan fungsi spesialisasi yang efektif dan

²⁰ Bagong (ed), *Perangkap Kemiskinan*, hlm. 55-56

efisien dengan dukungan pejabat – pejabat negara yang profesional, menjadi sangat sentralistik bukan hanya terbatas pada fungsi – fungsi menjalankan roda pemerintahan, akan tetapi merambah menjadi suatu proses sosial yang sentralistik dan mempengaruhi struktur dan alam pikiran masyarakat di berbagai level kehidupan. Dan gejala ini dikatakan sebagai budaya birokrasi.

Kuntowijoyo menunjuk kebudayaan birokrasi sebagai budaya yang berada di bawah bayang – bayang birokrasi, yang lahir karena struktur birokrasi yang serba berkuasa. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia saat ini, gejala ini menurut Kuntowijoyo, menjadi semakin kompleks karena terkait dengan struktur budaya masyarakat Indonesia yang dalam sejarah masa lalu pernah terstruktur oleh birokrasi patrimonial pada masa – masa kerajaan dan birokrasi kolonial pada era penjajahan. Dalam kondisi struktur seperti inilah, lahir kecenderungan kuat sentralisasi dan konformisme dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Sentralisasi ini dapat kita lihat pada semakin menguatnya kecenderungan hampir tidak ada budaya yang lepas dari intervensi dan kehadiran pejabat negara.

Sedangkan gejala konformisme ditunjukkan oleh budaya yang melayani kemauan struktur sosial. Dalam hal ini struktur birokrasi. Para birokrat, menjadi kelas sosial tersendiri, yang berada di lapisan atas dalam struktur sosial kehidupan masyarakat.

Dalam situasi budaya yang menghimpit inilah maka rakyat (bagian terbesar dari penduduk) menjadi lemah dalam tawar – menawar posisi dan peran sosialnya di hadapan negara (pemerintahan), kendatipun mereka adalah pemilik sah negeri

ini. Lebih dari itu, birokratisme telah membentuk kebudayaan menjadi linier, seragam, terpusat, yang menempatkan rakyat miskin menjadi sebagai penikmat kebudayaan kaum birokrat yang serba setia.²¹

Kemiskinan dalam satu masyarakat seringkali berkait dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat atau dengan bahasa yang lebih populer sebab – sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja atau mengolah sumber alam yang tersedia. Apabila orang itu rajin bekerja dapat di pastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Apalagi disamping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja yang tinggi dan sikap hemat dipastikan akan hidup lebih dari kecukupan. Misalnya di Indonesia orang melihat kehidupan rata – rata suku bangsa cina lebih baik secara ekonomi dari pada suku lain di Indonesia, karena orang cina dikenal sebagai suku bangsa yang sangat hemat dalam hidup sehari – hari mereka. Sebaliknya orang melihat bahwa penduduk asli Indonesia kebanyakan miskin karena mereka malas dan hidup yang sangat konsumtif. Akan tetapi budaya orang miskin yang dikatakan bahwa orang miskin malas (etos kerjanya rendah) dan cenderung konsumtif ini benar – benar tidak terjadi. Karena kenyataan empirik membuktikan bahwa justru orang miskin adalah orang yang bekerja paling rajin ini bisa kita lihat pada etos kerja seorang petani yang melakukan pekerjaan pada pagi

²¹ Haedar Nashir, *Strategi Kebudayaan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, dalam Majalah INOVASI Jurnal Universitas Muhammadiyah no. 2 TH. VII/ 1996, hlm 16 – 17

hari dan pulang pada sore hari akan tetapi yang terjadi adalah mereka tetap saja masih miskin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Robert Chambers (1983), mengatakan bahwa orang miskin tidak ada waktu untuk bermalas – malasan atau bersikap bodoh untuk hidup karena orang miskin adalah bagaimana dia mampu mempertahankan hidup. Orang miskin bahkan bekerja jauh lebih keras dari orang yang kaya karena tanpa bekerja ekstra keras maka mereka orang miskin akan mati. Begitu juga orang miskin yang malas dan bodoh pasti akan mati.²²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²² Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, hlm. 16-17

BAB III

FALSAFAH HIDUP ORANG JAWA

A. Hakekat Pandangan Hidup

Setiap masyarakat, bangsa atau suku mempunyai pandangan hidup. Umumnya pandangan hidup menyangkut eksistensi manusia di dunia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam dunia tempat dia berdiam. Pada dasarnya apa yang disebut pandangan hidup itu berkaitan erat dengan sikap manusia terhadap Tuhan-Nya, terhadap sesama-nya, terhadap alam dunia yang melingkupinya. Akan tetapi bagaimana dia bersikap itu tergantung dari pengalaman-pengalaman konkret yang diperolehnya ketika dia berhadapan dengan realitas- realitas tersebut. Pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian membentuk sikap hidup manusia terhadap realitas-realitas yang ada di sekitarnya, yang pada gilirannya membentuk pandangan hidupnya¹. Pandangan hidup menurut kamus antropologi (1984), adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam suatu masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah hidup di dunia. Pandangan hidup merupakan suatu penggaris yang mungkin dapat dinyatakan dengan kata-kata sebagai suatu rumusan dalam menyusun perasaan, pikiran dan kejiwaan dalam proses untuk berbuat dan bertindak. Pandangan hidup terkait dengan sikap manusia di dalam memandang diri dan lingkungannya sehingga sikap manusia ini di bentuk oleh adanya

¹ Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.108

kekuatan yang bersemayam pada diri manusia, yakni cipta, karsa dan rasa yang membentuk pandangan hidup perorangan yang kemudian beradaptasi dengan hidup perorangan lainnya

Menurut Dr. Theo Huijbers, ada beberapa tipe pandangan hidup yakni pandangan hidup umum, pandangan hidup negatif, dan pandangan hidup positif (1986:42-55).

Pertama, pandangan hidup umum yang berpandangan bahwa orang melihat kehidupan sebagai cukup bernilai bila kebutuhan-kebutuhan pokok hidupnya terpenuhi. Kebutuhan – kebutuhan pokok mencakup kebutuhan akan makan, minum, dan sebagainya. Dalam pemenuhan kebutuhannya seringkali membatasi perhatiannya pada kepentingan-kepentingannya sendiri. Sehingga lingkungan hidup mereka pun menjadi terbatas, yakni terbatas pada rumah tangga dan lingkungan kerjanya sendiri tanpa peduli akan kepentingan bersama dalam menikmati hidup. Dalam konteks inilah maka dapat dikatakan bahwa cara hidup semacam itu dilatarbelakangi oleh suatu pandangan hidup manusia di dunia ini dengan penuh kesusahan, baik penderitaan dan duka, maupun kejahatan. Bagi mereka Realitas kesusahan, penderitaan, dan kejahatan tak dapat diatasi dan kekurangan pada manusia mustahil dapat dipulihkan dan jangan pula berharap sesuatu yang ideal sehingga memunculkan sikap hidup yang pasrah terhadap suatu nasib yang tak terelakkan.

Kedua, pandangan hidup negatif yang berpandangan bahwa hidup ini mempunyai sisi negatif seperti penderitaan, kemalangan, duka cita dan kejahatan,



yang selalu menyertai langkah hidup manusia. Apalagi fakta-fakta tersebut pun tak bisa diatasi manusia secara tuntas. Manusia memang kerap kali tak berdaya ketika diterpa penderitaan dan kesusahan. Dalam hal inilah orang yang berpandangan hidup negatif melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang absurd, hampa, kosong, tiada berarti. Dan semuanya akan berakhir dengan kematian. Hidup di hadapi dan dijalankan dengan sikap yang lebih pesimistis ketimbang optimistis. Pandangan hidup ini secara nyata menampakkan diri dalam fenomena ketakutan. Karena hidup dianggap tiada berarti dan harapan pun dianggap hampa. Namun ketakutan yang meliputi mereka itu tidak sama dengan rasa takut terhadap hidup karena psike yang lemah dan karena dis harmoni intern (ketidak harmonisan seseorang dalam diri seseorang) karena rasa berdosa atau karena suatu konflik batin. Menurut Huijbers, ketakutan mereka itu disebut ketakutan eksistensial, yakni suatu rasa takut yang mencekam seluruh eksistensi seorang manusia. Tetapi ketakutan semacam ini tidak punya objek. Artinya, sebenarnya tidak ada suatu objek tertentu untuk ditakuti. Dia takut karena hidupnya terasa kosong, tak berarti dan ketidak senangan pribadi dengan hidup, atau karena pesimistis terhadap hidup.

Ketiga, pandangan hidup positif yang berpandangan bahwa hidup adalah sesuatu yang bermakna, meskipun secara nyata, kehidupan ini pun mempunyai sisi-sisi yang negatif. Dunia bagi orang-orang yang berpandangan hidup positif justru dianggap sebagai suatu tempat tinggal yang membetahkan. Dalam hidupnya tidak mengabaikan realitas penderitaan, duka dan kejahatan. Orang optimis disini

adalah orang yang realistic, yang mengakui adanya sisi-sisi kehidupan yang bersifat negatif. Namun mereka punya kesadaran bahwa sisi-sisi negatif merupakan konsekuensi logis dari kehidupan yang proses perkembangannya tidak bersifat sempurna, tidak juga bersifat statis. Dan proses ini selalu akan membawa manusia kepada kesempurnaan. Ada keindahan dan harapan dalam hidup untuk mencapai sesuatu yang didambakan atau dicita-citakan. Karena manusia tidak hidup sendirian di dunia ini melainkan relasi-relasi akrab, kebersamaan dengan orang lain merupakan jaminan bagi suatu kehidupan yang penuh arti dan tidak ada alasan untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problem dan tantangan. Sehingga sikap hidupnya selalu optimis dan hidup dalam penuh pengharapan. Artinya harapan menjadi dasar hidupnya dalam mendorong dan mengarahkan hidupnya ke masa depan serta ke arah suatu kehidupan yang lebih baik (bahagia).²

Akan tetapi definisi pandangan hidup ini sangat beragam. Sehingga penulis akan membicarakan dua definisi yang dipandang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Niels Mulder mendefinisikan pandangan hidup sebagai suatu abstraksi dari pengalaman hidup yang dibentuk oleh suatu cara berpikir dan cara merasakan tentang nilai-nilai, organisasi social, kelakuan, peristiwa-peristiwa dan segi-segi lain dari pada pengalaman; pandangan hidup merupakan suatu pengaturan mental dari pengalaman itu dan pada gilirannya mengembangkan sikap terhadap hidup³. Adapun Dr. Mudji Sutrisno Sj. Mendefinisikan pandangan

² Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan*, hlm. 116-120

³ Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1973), hlm. 35

hidup sebagai sebuah deskripsi mengenai bagaimana seseorang memahami kenyataan hidupnya, sehingga dari penempatan dirinya pada jagad ini lalu mencoba menarik pokok-pokok yang dipandang berharga untuk dijadikan pegangan khususnya dalam mengambil sikap⁴.

Dengan mendasarkan pada dua definisi di atas, secara sosiologis dapat diketahui bahwa pandangan hidup sangatlah penting, mengingat sikap hidup individu-individu atau golongan-golongan mendekati kenyataan atau realitas kehidupan ditentukan olehnya. Hal ini berarti bahwa pandangan hidup dapat dianalisis sebagai logika yang menghayati sebuah masyarakat.

Istilah “pandangan hidup Jawa” sendiri dalam beberapa literature diidentikkan dengan berbagai istilah, seperti: “ Filsafat hidup Jawa”⁵, “Kejawen dan Kejawaan”⁶. Meskipun dikenal dengan berbagai istilah, namun pada hakekatnya mengandung esensi bahwa pandangan hidup Jawa merupakan suatu konsepsi yang menjadi pegangan bagi orang Jawa untuk menghadapi realitas kehidupan yang terwujud dalam sikap hidupnya.

Pandangan hidup Jawa sendiri terbentuk karena perkembangan kebudayaan Jawa akibat pengaruh filsafat Hindu dan filsafat Islam. Orang Hindu yang datang ke Jawa menyebarkan agama indu membawa serta filsafat Hindu. Demikian pula pada saat kedatangan orang-orang Gujarat ke Jawa, tidak hanya

⁴ Maria A. Sarjono, *Paham Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.7

⁵ Budiono Herusatoto, *Symbolisme dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Hanindita, 1991), hlm.71

⁶ Sujamto, *Reorientasi dan Revitalisasi Pandangan Hidup Jawa*, (Semarang: Dahara Prize, 1997), hlm.43

menyebarkan ajaran – ajaran agama islam, tetapi merekapun mengembangkan keseluruhan alam pikiran Islam (Filsafat Islam). Tradisi Jawa, kepercayaan Hindu, tasawuf atau mistisisme Islam dan agama islam melebur diri menjadi suatu alam pikir Jawa⁷. Perlu diperhatikan bahwa dengan pandangan hidup jawa tidaklah berarti bahwa setiap orang yang tergolong etnik jawa pasti mempunyai pandangan hidup yang sama, sebab yang dinamakan kebudayaan adalah suatu kecenderungan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Clyde Kluckhohn : A Culture is a historically derived system of explicit and implicit designs for living, which tends to be shared by all or specially designated member of group. (kebudayaan adalah suatu pola hidup eksplisit dan implisit yang merupakan suatu sistem yang terbentuk oleh sejarah, yang cenderung diikuti oleh seluruh atau suatu bagian khusus dari suatu kelompok)⁸.

B. Masyarakat Jawa

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau dari kepulauan Indonesia, suatu kepulauan yang terbentang diantara 6° Lintang Utara, 11° Lintang Selatan dan 95° - 141° Bujur Timur. Pulau Jawa sendiri terletak di antara 5° - 10° Lintang Selatan dan 105° - 115° Bujur Timur. Pulau Jawa terdiri dalam lima daerah administratif pemerintahan yaitu Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Daerah

⁷ Budiono Herusatoto, *Symbolisme dalam Budaya Jawa*, hlm. 72

⁸ Sujanto, *Reorientasi dan Revitalisasi Pandangan Hidup Jawa*, hlm. 44

Khusus Ibu Kota Jakarta, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara antropologi budaya dapat dikatakan bahwa yang disebut suku Jawa adalah orang-orang yang secara turun temurun menggunakan bahasa Jawa dengan ragam dialek dalam kehidupan sehari-hari, dan bertempat tinggal di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur serta mereka yang berasal dari daerah tersebut⁹

Semula di Jawa di pergunakan empat bahasa yang berbeda. Penduduk - penduduk asli Ibu Kota Jakarta bicara dalam suatu dialek bahasa melayu yang disebut Melayu-Betawi. Dibagian tengah dan selatan Jawa Barat di pakai bahasa Sunda, sedangkan Jawa Timur bagian utara dan Timur sudah lama di huni oleh imigran-imigran dari Madura yang tetap mempertahankan bahasa mereka. Dibagian Jawa lainnya orang bicara dalam bahasa Jawa yang dipergunakan didataran-dataran rendah pesisir utara Jawa Barat, dari Banten Barat sampai ke Cirebon, cukup berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan yang disebut orang Jawa adalah orang yang bahasa ibunya memakai bahasa Jawa yang berdomisili penduduk asli bagian tengah dan timur pulau Jawa yang berbahasa Jawa.

Orang Jawa di bedakan dari kelompok-kelompok etnis lain di Indonesia oleh latar belakang sejarah yang berbeda, oleh bahasa dan kebudayaan mereka. Kebanyakan orang Jawa hidup sebagai petani atau buruh tani. Di daerah dataran rendah mereka bercocok tanaman padi, di daerah pegunungan mereka menanam

⁹ Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, hlm.37

ketela dan palawija. Sebagian besar pulau Jawa bersifat agraris penduduknya masih hidup di desa-desa. Di desa kebanyakan keluarga mempunyai rumah gedeg atau kayu terdiri atas beberapa kamar, dengan lumbung padi kecil. Rumahnya di kelilingi oleh semacam kebun. Kecuali dua kota pelabuhan, Surabaya dan Semarang yang semakin menjadi pusat perdagangan dan Industri, perkembangan kota-kota sebagian besar terbatas pada pusat-pusat pemerintahan dan administrative. Oleh karena dalam kondisi seperti itu maka, kebudayaan Jawa sendiri di bedakan lagi antara penduduk pesisir utara dimana hubungan perdagangan, pekerjaan nelayan, dan pengaruh Islam lebih kuat menghasilkan bentuk kebudayaan Jawa yang khas, yaitu kebudayaan pesisir, dan daerah-daerah Jawa pedalaman sering juga disebut "kejawen", yang mempunyai pusat budaya dalam kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, dan disamping dua karesidenan ini juga termasuk karesidenan Banyumas, Kedu, Madiun, Kediri, dan Malang.¹⁰

Suku Jawa merupakan mayoritas penduduk di Indonesia . mereka hidup dan tinggal di pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tetapi mereka juga hidup tersebar hampir keseluruhan kepulauan di Indonesia ini. Entah sebagai transmigran, entah sebagai pejabat dalam pemerintahan, entah pula karena alasan lain yang bersifat lebih pribadi. Menurut Marbangun Hardjowirogo, semua orang Jawa itu berbudaya satu. Mereka berpikir dan berperasaan seperti

¹⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 11-12

moyang mereka di Jawa Tengah dengan Kota Solo dan Yogyakarta sebagai pusat-pusat kebudayaan.¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan dalam mendeskripsikan tentang stratifikasi sosial masyarakat Jawa, sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim di pergunakannya. Pertama, perspektif keagamaan, dalam perspektif ini Geertz (1960) menjelaskan bahwa masyarakat Jawa dapat di bedakan menjadi tiga golongan. Yaitu, golongan santri, abangan dan priyayi. Kedua, perspektif sosio-ekonomi, dalam perspektif ini masyarakat Jawa menurut De Jong (1976) dapat di klasifikasi menjadi dua golongan. Yaitu, golongan priyayi (Raja dan bangsawan) dan petani (wong cilik). Pada kaum priyayi hidup nilai-nilai yang bersifat antroposentris. Sedangkan di kalangan kaum petani (wong cilik) hidup nilai-nilai yang bersifat kosmologis.¹²

Orang Jawa sendiri membedakan dua golongan social, yaitu: wong cilik (orang kecil) yang terdiri dari sebagian besar massa petani dan mereka yang berpendapatan rendah di kota. Golongan kedua adalah kaum priyayi, dimana termasuk pegawai dan golongan intelektual atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan aristokrasi turun-temurun yang berakar dalam kerajaan Hindu-Jawa kuno dan dalam perkembangannya dipergunakan oleh orang-orang Belanda dalam kepegawaian kolonial, dan sekarang menjadi dasar birokrasi Jawa.

Dalam proses hubungan perekonomian, antara Raja atau bangsawan (priyayi) dan wong cilik (petani) dikatakan bahwa golongan priyayi sebagai tuan

¹¹ Marbangun Hardjowirogo, *Manusia Jawa*, (Jakarta: Idayu Press, 1984), hlm. 7

¹² Darmanto Jatman, *Psikologi Jawa*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997). hlm.24

dan wong cilik sebagai abdi. Pada masa ini alat produksi yang berupa tanah adalah milik priyayi. Bahkan, wong cilik juga menjadi milik Raja yang dapat dikerahkan tenaganya untuk kepentingan penguasa. Artinya bahwa dalam proses produksi dan tanah sebagai alat produksi, kedudukan wong cilik yang menggarapnya hanya mempunyai hak menggunakan, tidak berhak memiliki atau menguasai. Tanah adalah milik kaum priyayi. Demikian pula, tenaga rakyat wajib diberikan bila raja menghendaknya untuk membersihkan keraton, mencari rumput untuk kuda-kudanya, melakukan penjagaan, mengangkut barang-barang dan sebagainya.

Dari tanah garapannya, petani wajib atau diharuskan menyerahkan separo hasil buminya kepada Raja (priyayi) sebagai upeti berupa buah-buahan, padi, bahan barang mentah atau yang sudah jadi. Dan selain ini apabila seorang raja takluk kepada seorang raja yang lain maka, raja itu harus mengirim upeti kepada raja pemenangnya dan ini dibebankan petani sebagai suatu kewajiban. Sehingga dalam kondisi seperti ini bagi wong cilik, jelas menambah beban yang semakin memberatkan, apalagi ketika kaum kolonial (penjajah) memanfaatkan sistem feodalisme ini untuk memungut surplus hasil bumi petani (wong cilik). Beban ini, *pertama*, harus menyerahkan sebagian hasil produksinya dan, *kedua*, harus bekerja secara cuma-cuma kepada Raja (priyayi), jelas membuat petani menjadi miskin karena sisa hasil produksinya yang mereka pakai sendiri adalah hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya saja (subsistensi). Sehingga tidak

ada *surplus value* (nilai lebih) hasil produksi yang bias di pakai untuk kepentingan kemakmuran dirinya. Semua surplus diserahkan pada raja (priyayi).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari kondisi diatas jelaslah, bahwa dalam hubungan ekonomi antara priyayi dan wong cilik terdapat hubungan yang *eksploitatif* dan bersifat menindas, sehingga telah memakmurkan raja, sementara petani diperas tenaganya dan sengsara. Sebab, dalam hubungan ini, aliran hasil bumi lebih banyak keatas (ke pihak raja), sedangkan aliran kebawah (petani) sedikit sekali. Dan juga dapat ditemukan dengan mudah dalam masyarakat feodal adanya selubung budaya yang menganggap bakti pada raja sebagai bakti terhadap Tuhan. Pemerasan tenaga petani merupakan kewajiban suci kepada wakil Tuhan di dunia, yaitu Raja.¹³

Di pulau Jawa, baik di tanah pasundan maupun di daerah jawa sendiri terjadi perubahan dalam memahami “elite” priyayi, dari abad -17 hingga kini. Tadinya golongan priyayi itu adalah kurang lebih “bangsawan”, aristokrasi yang dekat hubungannya dengan raja. Mereka merupakan semacam perantara, penghubung antara Raja dengan rakyatnya. Setelah “perang-perang suksesi” yang mengerikan sampai pertengahan abad -18 membuat kaum bangsawan itu terus - menerus berada dalam keadaan kalut, lalu perang Jawa (1825-1830) yang pada akhir semangat perang mereka, pemerintah Batavia memutuskan untuk merangkul mereka. Setelah mengucilkan para pembangkang ke Sulawesi dan Sumatera, belanda berusaha membina hubungan baik dengan yang lain, dengan mengangkat mereka menjadi pembantu yang setia. Mereka tersekitukan oleh keuntungan -

¹³ Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.16-17

keuntungan yang mereka petik dari *Cultuur Steisel*, para priyayi ini akhirnya menjadi pendukung kepentingan belanda. Sebagai imbalan tertinggi, mereka di perkenankan sampai batas tertentu ikut serta dalam kebudayaan para penakluk mereka. Pada dasawarsa-dasawarsa terakhir abad ke -19, ketika pemerintah harus memperkuat administrasi negeri jajahannya, dengan sendirinya mereka mengangkat pegawai-pegawai baru dari kalangan “bangsawan” tua itu. Bagi para priyayi ini, mengabdikan ratu belanda menjadi kehormatan tertinggi, sebagaimana dahulu mengabdikan Susuhunan merupakan kehormatan bagi nenek moyang mereka, dan kedudukan mereka pun dikaitkan kembali pada suatu struktur hierarki birokratis sebagai pejabat pemerintah atau “*pangreh praja*”. Setelah kemerdekaan, sebagai kelompok tersendiri yang berpranata khusus sebenarnya priyayi sudah tidak ada lagi. Gelar *ningrat* sudah resmi dihapus dan sistem administrasi kolonial seperti dulu pun tidak ada lagi. Akan tetapi moral para priyayi yang terbentuk dari konformisme Jawa dan disiplin Calvinis masih tetap berlaku dan menonjol

Disamping lapisan sosial ekonomis itu, dalam pembedaan kelompok atas dasar keagamaan yang meskipun secara nominal termasuk agama Islam namun berbeda cara penghayatannya. Golongan pertama lebih ditentukan oleh tradisi Jawa pra Islam dan disebut Jawa Kejawen. Dalam kepustakaan, kelompok ini disebut abangan. Golongan kedua, adalah golongan orang-orang Jawa yang beragama Islam yang berusaha hidup menurut ajaran Islam, disebut dengan

golongan santri.¹⁴ Namun apapun golongannya, mereka semua adalah orang Jawa dengan ciri-ciri khasnya yang tercermin dalam sikap mereka untuk menghadapi berbagai macam segi kehidupan ini.

C. Budaya Masyarakat Jawa

Kata budaya menurut perbendaharaan bahasa Jawa berasal dari kata 'budi' dan 'daya'. Prof. Dr. Koentjaraningrat berpendapat bahwa kata 'budaya' berasal dari bahasa Sansekerta, *buddhayah*, bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal). Jadi kebudayaan itu dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Keluhuran sifat-sifat hidup itu melahirkan rasa budaya manusia. Kalau rasa budaya itu dilaksanakan, maka terjadilah kebudayaan manusia.

Alam sekitarnya yang *subur kang tanpa tinandur, gemah ripah loh jinawi* yang tidak dibudidayakan dengan sebaik mungkin, tidak ada gunanya. Tetapi sebaliknya, berkat kerja akal manusia, dilandasi kesadaran etik dan estetik, alam yang potensial itu benar-benar berarti bagi kehidupan manusia.

Manusia adalah makhluk budaya. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa, kebudayaan merupakan ukuran bagi tingkah laku serta kehidupan manusia. Kebudayaan pun menyimpan nilai-nilai tentang tanggapan manusia terhadap dunia, lingkungan serta masyarakatnya. Seperangkat nilai-nilai yang menjadi landasan pokok bagi penentuan sikap terhadap dunia luar, bahkan menjadi dasar setiap langkah yang dilakukan.

¹⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm.12-13

Menurut Koentjaraningrat, bahwa wujud dan isi kebudayaan manusia mengandung tiga dimensi. *Pertama*, kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Eksistensi kebudayaan ini pada alam pikiran masyarakat, dapat pula berupa tulisan -tulisan, karangan -karangan. *Kedua*, kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas yang sudah di pola dalam masyarakat. Wujud kebudayaan ini berupa sistem social dalam masyarakat. *Ketiga*, kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Ia bisa berupa kebudayaan nyata, tampak fisiknya, karena merupakan hasil karya masyarakat yang bersangkutan. Ketiga wujud dari kebudayaan itu jelas bahwa wujud pertama dan kedua merupakan hasil akal dan budi manusia, sedang yang ketiga adalah karya manusia.¹⁵

Budaya Jawa merupakan kebudayaan yang sulit untuk dideskripsikan karena kebudayaan Jawa itu tidak bersifat homogen apalagi bersifat monolitik. Franz Magnis (1984), menyatakan bahwa yang dimaksud orang Jawa adalah suatu konstruksi teoritis, dan tidak menunjukkan kelompok orang perorangan konkret tertentu.

Demikianlah, batasan “kebudayaan Jawa” sebagai segala wujud penghayatan serta pengungkapan penafsiran hidup orang Jawa sesungguhnya telah menembus batasan itu sendiri. Para pengamat kebudayaan Jawa banyak yang mencoba mendeskripsikan nilai-nilai orang Jawa seperti, *sabar*, *riila* dan *nrima*, yang oleh De Jong (1976) di anggap sebagai sikap hidup pangestu (Paguyuban

¹⁵ Budiono Herusatoto, *Symbolisme Dalam Budaya Jawa*, hlm. 7-8

Ngesti Tunggal) sebagai usaha manusia untuk mengambil jarak terhadap “*jagad cilik*”nya, serta kemudian murni menjadi utusan Tuhan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nilai-nilai adalah bagian dari wujud abstrak kebudayaan yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia. Keterkaitan antara nilai dengan sikap hidup inilah yang biasa disebut sebagai mentalitas. Salah satu sikap hidup yang dianggap menonjol pada orang Jawa adalah ketergantungannya pada masyarakat, demikian Mulder (1973), dinyatakan bahwa kepribadian orang Jawa hampir sama sekali bersifat social. Seseorang adalah baik apabila masyarakatnya menyatakan demikian. Sementara tentang hierarki nilai-nilainya Mulder (1973) menulis :

“Manusia Jawa tunduk kepada masyarakat, sebaliknya masyarakat tunduk kepada kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dan halus, yang memuncak ke Tuhan”¹⁶.

Budaya Jawa atau sifat tradisi di Jawa adalah penuh diliputi oleh mitos dan upacara. Perjalanan hidupnya banyak bergantung pada rangkaian hubungan macam-macam system social dan nilai-nilai kehidupan yang menuju pada suatu derajat tinggi yang terpola. Keberadaan individu adalah untuk masyarakat dan manusia berperan memainkan dalam peribahasa, perkataan-perkataan dan system atau suatu pesan.

Dalam proses pembentukan budaya Jawa, agama mempunyai peranan yang sangat menentukan. Agama akan membentuk watak dan pribadi pemeluknya. Agama Hindu, Budha, Islam abangan dan kebatinan, ajarannya tercermin dalam kehidupan. Kesemua ajaran tersebut memperlihatkan adanya

¹⁶ Darmanto Jatman, *Psikologi Jawa*, hlm. 23

kesinambungan antara Tuhan atau tokoh Ilahi dengan manusia. Secara filsafati agama Hindu dan Budha serta kebatinan Islam mengajarkan bahwa manusia bukan hanya dipandang sebagai penjelmaan atau penumbuhan Ilahi melainkan juga hal yang paling lengkap dan paling sempurna.

Pengaruh ajaran ini tercermin dalam struktur social, kelompok elit penguasa ada kecenderungan ingin mempunyai sifat-sifat keilahian, seperti: tidak mau menerima kritik dan cenderung memaksakan kehendak di sertai dengan kekuatan. Kebatinan di Jawa mendapatkan kedudukan dalam politik, sebab kepercayaan diakui secara *de facto* pada taraf yang sama dengan agama. Inti ajaran kebatinan sering nampak tergambarkan dalam tatanan politik Jawa melalui pemahaman bahwa orde social harus dalam keadaan seimbang, tenang dengan jagad raya , *nrimo* dan sujud kepada Syang Hyang Maha Kuasa sehingga Gusti dan Kawula dapat bersatu padu .¹⁷

Hinduisme juga mempengaruhi munculnya dua lapisan tradisi budaya jawa. Yakni tradisi besar yang berkembang di lingkungan istana dan bersifat Hindu -Kejawen: tradisi kecil atau tradisi petani yang tetap buta huruf dan terpusat pada religi animisme dan dinamisme. Tradisi besar yang bersifat Hinduistik berkembang di istana kerajaan laksana bukit yang menjulang tinggi di atas tradisi budaya petani. Bangunan candi menunjukkan kuatnya pengaruh

¹⁷ M. Munandar Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi*, hlm. 4 -5

Hinduisme dalam menumbuhkan lapisan cendekiawan Jawa yang punya Falsafah dan wawasan keagamaan yang halus.¹⁸

Dengan demikian, budaya dan agama India merupakan perkenalan mereka yang pertama dan tertanam secara mendalam. Peng-hindu-an Jawa secara hierarkis terjadi, mulai dari pusat (raja) ke daerah -daerah (bupati, raja daerah). Keraton, raja, sebagai pusat adalah sentralisasi segalanya. Raja adalah “*gung binatara*” (dewa raja), dengan kuasa mutlak, sebagai Siwa, Wisnu, dan Siwa-Budha. Lingkungan kraton (negara) dihuni oleh kaum literer pusat studi yang elitis, rakyat petani menerimanya secara lisan. Sehingga terjadi transformasi nilai Jawa -India. Nilai jawa yang di indiakkan dan India di jawakan.¹⁹

Sikap hidup orang Jawa dalam Sasangka Djati, yang terdapat dalam Hasta Sila atau delapan sikap dasar, yang terdiri dari dua pedoman yakni, Tri-Sila dan Panca-Sila. Trisila merupakan pokok yang harus dilaksanakan oleh manusia setiap hari, dan merupakan tiga hal yang harus dituju oleh budi dan cipta manusia di dalam menyembah Tuhan yaitu, *eling* atau sadar, *pracaya* atau percaya dan *mituhu* atau setia melaksanakan perintah.

Yang dimaksud *eling* atau sadar ialah selalu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Tunggal. Menurut ajaran R. Soenarto yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Tunggal adalah kesatuan dari tiga sifat yaitu: Sukma kawekas atau Allah

¹⁸ Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 54

¹⁹ Jakob Sumarjo, *Arkeologi budaya Indonesia*, (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. 37



Ta'ala, Sukma sejati atau Rosulullah dan ruh suci atau jiwa manusia yang sejati, ketiga-tiganya disebut Tri Purusa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yang dimaksud *pracaya* atau peracaya ialah percaya terhadap Sukma Sejati atau utusan-Nya, yang disebut Guru Sejati. Dengan percaya kepada utusan-Nya berarti pula percaya kepada jiwa pribadinya sendiri kepada Allah, karena ketiga-tiganya adalah Tunggal, yaitu yang disebut Tri Purusa tadi.

Sedang yang disebut *mituhu* ialah setia dan selalu melaksanakan segala perintah-Nya yang disampaikan melalui utusannya.

Sebelum manusia dapat melaksanakan Tri-Sila tersebut di atas, ia harus berusaha dulu untuk memiliki watak dan tingkah laku yang terpuji yang disebut Panca-Sila, yaitu: *rila* atau rela, *narima* atau menerima nasib yang diterimanya, *temen* atau setia pada janji, sabar atau lapang dada, dan budi luhur atau memiliki budi yang baik. Selanjutnya Pangestu R. Soenarto menguraikan bahwa:

Pertama, *rila* itu keikhlasan hati sewaktu menyerahkan segala miliknya, kekuasaannya kepada Tuhan, mengingat bahwa semua itu ada pada kekuasaan-Nya.

Kedua, *narimo* banyak pengaruhnya terhadap ketentraman hati. Orang yang *narimo* tidak loba dan ngangsa. *Narimo* berarti tidak menginginkan milik orang lain, serta tidak iri hati dengan kebahagiaan orang lain artinya dapat dikatakan orang yang bersyukur kepada Tuhan.

Ketiga, *temen* berarti menepati janji dari ucapannya sendiri baik lisan maupun dalam hati. Orang yang tidak menepati kata hatinya berarti menipu

dirinya dan orang yang tidak menepati kata hati yang telah diucapkan sama dengan dusta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keempat, *sabar* merupakan tingkah laku terbaik, yang harus dimiliki setiap orang. Semua agama menjelaskan bahwa Tuhan mengasihi orang yang bersifat sabar. Sabar itu berarti kuat dalam menghadapi cobaan, tetapi bukan berarti putus asa.

Kelima, yang dimaksud *budi luhur* yaitu apabila manusia selalu berusaha untuk menjalankan hidupnya dengan segala tabiat dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha mulia, seperti kasih sayang sesamanya, suci, adil dan tidak membedakan pangkat dan derajat seseorang. Ia juga suka menolong sesama tanpa mengharapkan balas jasa. Tetapi pengorbanan tidak dilakukan dengan membabi buta, melainkan dengan segala kejernihan, pikiran dan jiwa yang di peroleh dari tuntunan utusan -Nya. Semua ini bisa dilakukan apabila empat sifat yakni, *rila, narimo, temen serta sabar telah dikuasainya*.²⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun mengenai dasar masyarakat Jawa, secara garis besar dapatlah dikatakan bahwa bentuk kemasyarakatan Jawa pada dasarnya terdiri dari:

1. Masyarakat kekeluargaan

Masyarakat Jawa bukanlah merupakan sekumpulan manusia yang menghubungkan individu satu dengan yang lainnya dan individu satu dengan masyarakat, akan tetapi merupakan suatu kesatuan yang lebih terikat satu sama lain oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun religi.

²⁰ Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, hlm. 72-73

Hidup kekeluargaan itu sungguh-sungguh mewujudkan hidup bersama dalam masyarakat yang paling kecil yang disebut masyarakat desa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Semboyan-semboyan *saiyeng saeko-praya* merupakan rangkaian hidup tolong menolong sesama warga atau keluarga. Hal ini merupakan cirri dari kepribadian orang Jawa. Oleh karena itu, masyarakat Jawa bukanlah merupakan persekutuan individu, melainkan suatu kesatuan bentuk "satu untuk semua dan semua untuk satu".

2. Masyarakat Gotong Royong

Sifat hidup gotong royong yang merupakan penerus dari hidup kekeluargaan adalah merupakan penerus naluri dari generasi ke generasi berikutnya. Semangat gotong royong yang merupakan adat tradisional dalam masyarakat desa, dipupuk terus secara dinamis dengan sistem ilmu pengetahuan modern dalam bentuk-bentuk organisatoris. Bentuk masyarakat desa yang organis (kekeluargaan) disintesakan dengan system modern organisatoris menjadi bentuk-bentuk seperti koperasi, *arisan sinoman*, dan sebagainya.

3. Masyarakat Berketuhanan

Suku Jawa pada jaman purba mempunyai pandangan hidup animisme atau suatu kepercayaan adanya roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuh-tumbuhan, hewan dan juga pada manusia sendiri. Masuknya agama Hindu ke Jawa membawa pandangan hidup manusia ke dalam dewa-dewa yang mempunyai dan menguasai alam semesta. Kemudian masuknya agama Budha,

Islam, Kristen, dan Katolik ke Jawa membawa perkembangan lebih lanjut kepada suatu keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkembangan tingkat demi tingkat, sesuai perkembangan jaman tetap menggambarkan kehidupan beragama masyarakat Jawa dari dulu sampai sekarang²¹.

Disamping sikap orang Jawa seperti, *riya*, *narimo*, *temen* dan bentuk masyarakat seperti kekeluargaan, gotong-royong dan berketuhanan. Ada nilai yang dianggap sangat penting oleh orang Jawa yaitu *sak madya*. Artinya, yang sedang-sedang saja, *sak cukupe* (cukupan), tidak banget-banget, tidak ekstrem. Kalau kaya tidak usah kaya sekali. Kalau melarat tidak usah melarat sekali. *Urip sak madya*, hidup sedang-sedang saja, merupakan hal yang dianggap ideal bagi orang Jawa, meskipun kini nilai semacam itu tampaknya tidak dianggap berlaku lagi untuk kehidupan sehari-hari. *Sak madya*, berarti pula *ora ngoyo*, *ora ngongso*. Tidak menggebu-gebu dalam mencari penghasilan. Karena menganggap hidup ini hanyalah persinggahan sejenak saja dalam perjalanan panjang. Hidup ini hanyalah untuk *mampir ngombe* (untuk singgah minum saja). Karena itu, hidup mestilah *sakmadya saja*.

Nilai *sak madya* membuat orang Jawa tidak begitu menyukai segala sesuatu yang *nyekek*, yang banget-banget, ekstrim. Boleh memeluk Islam misalnya, tetapi ya tidak usah banget-banget. Pandangan seperti inilah yang kemudian melahirkan gaya hidup *abangan*, gaya hidup Islam *sing ora nyekek*, yang tidak Islam banget.

²¹ Budiono Herusatoto, *Symbolisme Dalam Budaya Jawa*, hlm. 42-43

Nilai *sak madya* merupakan perwujudan dari cerita pewayangan Jawa yaitu semar. Semar dan anak-anaknya dikenal sebagai punakawan. Sosok semar yang *ambiguous*, dia adalah dewa yang dapat menjelma berbagai tokoh, sehingga semar bisa dikatakan dewa dan juga manusia. Walaupun dewa, tetapi tidak menampakkan kedewaannya. Dalam bahasa Umar Kayam, dia itu *sugih tanpa bondo* (kaya tanpa harta), sakti tapi tidak menunjukkan kesaktiannya. Semar adalah perwujudan manunggalnya Kawula dan Gusti. Sosok luarnya adalah Kawula, yang sederhana, *elek, ndesani*, tetapi sosok dalamnya adalah Gusti yang mulia, *apik*, dan sakti. Posisi yang di tengah inilah yang ideal dan pada kedudukan inilah semuanya di satukan. Karena berada pada sumbu kehidupan, yang terlepas dari gerak naik-turun, susah- senang, serta di tengah berarti *meneng*, diam, sunyi, semedi. Menuju pada *manunggaling kawula gusti*.²²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²² Aprinus Salam (ed), *Umar Kayam dan Jaringan Semiotik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 78-79

BAB IV

ANALISA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

FALSAFAH HIDUP ORANG JAWA DAN KEMISKINAN

Dalam melihat persoalan yang terjadi dalam suatu masyarakat, termasuk tentang budaya dan kemiskinan akan melahirkan suatu pandangan yang berbeda. Perbedaan ini akan menimbulkan penafsiran yang berbeda dan juga solusi yang diambil dalam melihat persoalan itu. Salah satu yang menjadi perbedaan adalah dasar filsafat yang di acunya, sehingga asumsi dan aksiomanya pun akan berbeda¹.

Pandangan sosilogi yang dikembangkan oleh buran dan morgan (1979) dapat membantu kita dalam memahami cara pandang berbagai aliran dan teori dalam ilmu social, mereka membantu dalam memetakan keruwetan peta teori ilmu social dengan mengajukan peta filsafat dan teori social. Dengan sederhana mereka digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mengelompokkan teori social kedalam empat kunci paradigma. Empat paradigma tadi dibangun diatas pandangan yang berbeda mengenai dunia social. Masing-masing berpendirian dalam kebenarannya dan melahirkan analisis tentang kehidupan social. Empat pandangan paradigma itu adalah: *humanis radikal*, *strukturalis radikal*, *interpretatif*, dan *fungsionalis*²

¹ M. Munandar Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 62

² Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002), hlm. 34 -35

Dari ke empat pandangan yang berbeda tadi akan melahirkan teori yang berbeda pula dalam melihat realitas social. Apakah paradigma atau teori itu akan mampu membentuk pikiran kritis atau sebaliknya. Artinya pemakaian paradigma atau teori itu di atas mencerminkan keberpihakan seseorang dalam melihat realitas dan sekaligus mengubahnya. Ini adalah konsekuensi karena pada dasarnya tidak ada suatu pandangan atau teori social yang bersifat netral.

Teori kritik yang penulis gunakan sebagai landasan teori untuk melihat tentang pandangan hidup dan kemiskinan masyarakat Jawa. Pada dasarnya adalah semua teori social yang punya maksud dan Implikasi praktis sangat berpengaruh terhadap teori perubahan social atau kritik. Teori kritik tidak sekedar teori yang melakukan kritik terhadap ketidakadilan system yang dominan melainkan suatu teori untuk mengubah system dan struktur tersebut. Teori kritis secara radikal memiliki pandangan tentang kajian teori dan praktek. Dengan demikian teori kritik sesungguhnya justru merupakan teori perubahan social atau transformasi social³. Dalam hal ini, akan di gunakan untuk menganalisis Pandangan hidup orang Jawa tersebut dalam kaitannya dengan fenomena kemiskinan yang terjadi di masyarakat Jawa.

A. Analisa Pandangan Hidup dan Budaya Masyarakat Jawa

Secara umum dapat digambarkan bahwa pandangan hidup dan budaya masyarakat Jawa tidak merupakan sebuah pandangan hidup dan budaya masyarakat yang lebih maju. Sikap *nrimo ing pandum, pasrah* terhadap semua

³ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, hlm. 93

apa yang menimpa pada dirinya, lebih baik mengalah dari pada bermusuhan.

Menjadi salah satu ukuran mengapa masyarakat perlu di modernisasi. Agar masyarakat tidak ketinggalan jaman dan terus terbelenggu oleh keadaan yang miskin.

Dari pandangan hidup dan budaya masyarakat jawa yang seperti digambarkan di atas, ada hal yang lebih penting untuk kita perhatikan. Tidak hanya sekedar pandangan hidup orang jawa itu seperti apa, tapi bagaimana proses terbentuknya pandangan hidup orang jawa dan siapa yang membentuk pandangan hidup itu. Apakah pandangan hidup itu dibentuk oleh kaum priyayi dan wong cilik (petani) secara bersama-sama ataukah pandangan hidup itu hanya dibentuk oleh kaum priyayi (bangsawan) untuk melestarikan kekuasaannya sehingga wong cilik (petani) selalu mengabdikan pada penguasa jawa sejelek apapun mereka diperlakukan.

Dalam memahami pandangan hidup dan budaya masyarakat jawa, kita perlu memahami bahwa dalam konteks budaya jawa pernah mengalami apa yang dinamakan dualisme kebudayaan, yaitu antara budaya keraton dan budaya populer. Dua jenis kebudayaan ini sering dikategorikan dalam kebudayaan tradisional. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mengenal kebudayaan. Pertama siapa atau lembaga apa yang menciptakan kebudayaan; kedua, bagaimana bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan itu; dan yang terakhir efek apa yang ditimbulkan olehnya.

Untuk konteks budaya istana atau budaya keraton, kebudayaan dikembangkan oleh *abdi -dalem* atau pegawai istana, mulai dari pujangga sampai arsitek. Raja berkepentingan menciptakan symbol-simbol budaya tertentu dengan tujuan untuk melestarikan kekuasaannya. Biasanya bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan untuk kepentingan itu berupa mitos. Didalam sastra kerajaan, mitos-mitos itu dihimpun misalnya dalam *babad*, *hikayat*, *lontara*, dan sebagainya. Hampir semua mitologi yang terdapat dalam bentuk –bentuk sastra semacam itu berisi cerita-cerita ajaib tentang kesaktian raja, kesucian, atau tentang kualitas-kualitas supra-insani raja. Sesungguhnya, efek yang hendak dimaksudkan agar rakyat loyal kepada kekuasaan raja. Sebagai misal, dalam *babad* Jawa, raja digambarkan sebagai pemegang “wahyu” yang dengannya ia merasa sah untuk mengklaim dirinya sebagai wakil tuhan untuk memerintah rakyatnya. Sultan Agung contohnya yang memiliki gelar *kholifatulloh* atau wakil Tuhan di tanah Jawa⁴.

Sedangkan sejak awal abad-14, sebenarnya pola-pola legitimasi dalam kekuasaan sudah dilakukan. Ini dapat dibuktikan pada terbentuknya buku atau kitab *negara kartagama* (pupuh 81, bait 2, 3 dan 4) yang bertutur tentang struktur masyarakat yang ideal dengan menyebut “keempat kelas” (*caturjana*) yang terdiri atas “mereka yang lahir baik” (*sujanma*). Pertama-tama terdapat para *mantri* atau “pejabat tinggi” serta para *arya* atau “kaum bangsawan”; lalu para *kryan* yang berstatus *ksatriya*, dan para *wali* atau “perwira”, yang

⁴ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm.230-231

tampaknya juga merupakan semacam golongan “bangsawan rendah”; dan akhirnya para *wai'sya* dan *sudra*. Mpu tantular berbuat serupa dalam karyanya *sutasoma*. Dan ini pun juga berefek pada pemakaian bahasa, antara bahasa halus dan kasar. Bahasa halus dipakai penutur dalam menghadapi seseorang yang secara khusus layak di hormati, misalnya sang raja, atasan atau bangsawan. Seperti yang diungkapkan tome pires dalam *Suma Oriental* keberadaan tingkatan bahasa: “tidak ada tempat lain di dunia yang sifat angkuhnya (*oufanja*) menonjol sedahsyat di Jawa yang mempunyai dua bahasa, yang satu dipakai oleh kaum bangsawan dan yang lain oleh rakyat biasa (*haa duas lingoagees, huua amtre fidallguos e outra do pouoo*)⁵.”

Disamping mitos, budaya kraton juga memproduksi sastra mistik. Jika mitos ditujukan untuk mengukuhkan kekuasaan raja dan loyalitas rakyat kepadanya, maka sastra mistik ditujukan untuk memberikan pengetahuan tentang kosmologi. Dalam khazanah mistik Jawa misalnya, kita mengenal adanya sastra suluk yang menggambarkan tentang *sangkan-paraning-dumadi* suatu konsep tentang realitas kosmos dan kedudukan manusia di dalamnya. Sastra-sastra mistik kerajaan semacam ini seolah-olah memberikan pesan agar manusia bisa memahami dunianya dalam konteks kosmologi keraton.

Dua produk budaya yang bersifat mitis dan mistis yang diciptakan oleh keraton itu sama-sama ditujukan untuk mempertahankan *status quo* kerajaan. Mitologi dan mistisisme keraton seringkali berisi cerita-cerita yang sangat naif.

⁵ Denny Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996). hlm. 60

Dalam rangka melegitimasi kekuasaan mutlak nya misalnya, raja menciptakan semacam silsilah genealogis bahwa dia adalah keturunan dewa. Tapi anehnya, pada saat yang sama dia juga mengklaim sebagai keturunan para nabi.

Yang menarik adalah bahwa ternyata, betapapun dalam kebudayaan keraton dominasi Hinduisme ataupun filsafat pra-Hindu terasa sangat kuat, namun pengaruh Islam pun meninggalkan bekas yang cukup kuat pula. Dalam silsilah genealogis raja-raja Jawa itu contohnya, kita melihat banyak sekali konsep yang dipinjam dari warisan mistik Islam. Meskipun para raja Jawa diklaim sebagai keturunan dewa – suatu indikasi yang menunjukkan pengaruh Hinduisme – tapi akar genealogis teratas dilukiskan dalam konsep *nur-roso* dan *nur-cahyo*. Menurut silsilah keraton, *nur-roso* dan *nur-cahyo* inilah yang melahirkan Nabi Adam dan dewa-dewa sebagai kakek moyang raja-raja Jawa. Istilah *nur-roso* dan *nur-cahyo*, betapapun konotasinya bersifat sangat Jawa, tetapi mengingatkan kita pada konsep nur- Muhammad dalam khazanah mistik Islam. Jelaslah bahwa dari contoh ini saja kita dapat mengambil kesimpulan bahwa banyak budaya mistik Islam dipinjam oleh kebudayaan keraton Jawa, kendatipun ia justru dipakai untuk melegitimasi kosmologinya sendiri⁶.

Yang menarik untuk diperhatikan ialah bahwa meskipun proses modernisasi sedang berlangsung, konsep-konsep kuno tentang kekuasaan itu berhasil bertahan sampai sekarang bukan hanya terdapat dalam “museum

⁶ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, hlm. 31

hidup” masa lalu, seperti kerajaan-kerajaan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi juga di Jakarta dalam lingkungan kepresidenan Republik Indonesia. Kedua presiden RI, Soekarno dan Soeharto adalah orang Jawa yang cenderung menghidupkan kembali ciri-ciri tertentu dari kekuasaan raja tradisional. Meskipun sampai pada tahun 1965, sifat kejawaan rezim Soekarno masih sering dibicarakan oleh orang bermula dari ”sinkretisme ideologi Pancasila. Pengaruh wayang dalam pidato-pidato dengan sifat Soekarno sebagai seorang dalang yang lebih menyukai dunia bayang-bayang daripada kenyataan, sampai kepada nafsu birahi, yang setan dengan nafsu seorang raja Majapahit atau Mataram⁷. Soeharto pun juga demikian, sudah banyak yang tahu bahwa dia sering minta nasehat kepada dukun Jawa dan bahwa isterinya telah berusaha memperkokoh hubungan kekerabatannya dengan mangkunegaran artinya dengan Mataram. Terbukti pula pada sekurang-kurangnya tiga monumen simbolis yang dibangun atau dibangunnya kembali pada tahun-tahun belakangan ini, ketiga monumen ini ialah monas yang menjulang di tengah-tengah lapangan Merdeka Jakarta, bagaikan pusat seluruh negeri. Kedua, Taman Mini Indonesia Indah, sebuah miniatur Indonesia yang dibuat di atas sebuah danau buatan. Disekelilingnya terdapat anjungan-anjungan buatan arsitektur tradisional yang mewakili masing-masing provinsi dan daerah. Namun bangunan ini telah mengingatkan kita pada sebuah kutipan dari *nagarakartagama* yang menampilkan ibu kota sebagai semacam mikrokosmos yang mencerminkan seluruh kerajaan dan

⁷ Dennys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, hlm. 68-69

ketiga adalah Candi Sukuh yang dibangun di lereng gunung lawu. Candi itu dipugar dan dilengkapi dengan bangunan yang baru bukan atas prakarsa para arkeolog tetapi atas permintaan pihak kepresidenan. Dengan demikian bahwa penguasa zaman sekarang pun tetap diresapi tradisi lama⁸.

Dari pemaparan di atas kita dapat menganalisis secara kritis bahwa munculnya pandangan hidup orang jawa bukan lahir secara alamiah. Melainkan pandangan hidup dan budaya orang jawa, di lihat dari konteks historisnya muncul karena di dorong oleh kepentingan penguasa-penguasa kerajaan yang ada di jawa entah kerajaan mataram, majapahit atau pun yang lainnya untuk melestarikan kekuasaan yang mereka miliki. Pandangan hidup orang jawa terutama wong cilik di pola untuk mendukung dari apa yang di lakukan oleh raja sebagai pemegang kekuasaan dan kebenaran. Raja bekerjasama dengan para pembuat cerita atau pujangga untuk menceritakan keperkasaan dan kesucian sang raja. Dengan harapan supaya rakyat tetap tunduk dan patuh pada penguasa, sejelek apapun cara menjalankan kekuasaannya. Seperti kitab *nagarakartagama* yang di susun oleh Mpu Prapanca atas suruhan Hayam Wuruk, sehingga dalam proses penciptaan nilai tersebut dapat dikatakan sebagai hegemoni budaya.

Jadi sikap orang jawa yang *sabar, nrimo ing pandum*, lebih suka mengalah dari pada terjadi kerusuhan yang mencerminkan sikap kompromi

⁸ Dennys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, hlm. 71

adalah suatu budaya yang memang di ajarkan oleh penguasa Jawa entah dari dulu sampai sekarang adalah untuk mereda gejolak wong cilik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Falsafah Hidup Orang Jawa dan Kemiskinan

Seiring dengan proses hegemoni budaya yang dilakukan oleh penguasa (raja) kepada wong cilik terjadi pula proses eksploitasi ekonomi terhadap wong cilik dengan berbagai bentuk.

Berbeda dengan tatanan social politik dan social masyarakat diluar Jawa, yang peranan pentingnya dalam politik dimainkan oleh orang kaya, sedangkan tatanan politik di Jawa tidak memberikan kepada kaum saudagar untuk berperan secara signifikan dan tak seperti kerajaan-kerajaan bahari yang amat bergantung pada kegiatan komersial. Dan perdagangan, pemerintahan pengelola pertanian mengandalkan sumber pendapatannya kepada kaum tani, tanah dan tenaga kerjanya⁹. Penguasa negara agraris menguasai sewa tanah sementara petani diwajibkan bercocok tanam hanya dengan anggadhuh. Pada saat bersama, begitu umat berubah menjadi kawula semangat dagan berubah dan di gantikan oleh mentalitas petani. Dengan kata lain umat mengalami proses reasontization.

Dalam kerangka negara agraris, yang secara teoritis menyisihkan petani dari tanah mereka, hak untuk menggarap tanah kemudian dianggap sebagai suatu privilege yang di berikan oleh penguasa kepada petani. Demikianlah kata

⁹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, hlm. 82

yang tepat untuk pajak pada zaman negara agraris patrimonial Jawa itu adalah sewa, sewa – tanah berkisar dari seperlima sampai dua perlima dibayarkan, baik dalam bentuk natura ataupun kontan. Pajak bukan hanya saja di tarik dari tanaman padi tetapi juga ditarik dari produksi pertanian lainnya, seperti buah-buahan, kapuk dan pohon-pohon penghasil sari buah. Di samping itu petani juga harus bertindak sebagai buruh *korve* untuk para pejabat, bangsawan dan raja. Semua orang yang berbakat di kerajaan harus mengabdikan pada raja. Penyanyi, musisi, dalang, pemahat, pandai besi (mpu) – semuanya harus mengabdikan pada istana¹⁰. Para punggawa istana di gaji dengan alokasi pemberian wilayah desa dimana pemegangnya memiliki hak untuk mendapatkan pajak-pajak desa dan setiap pejabat memiliki hak untuk di layani oleh kawula seperti menjaga rumahnya di malam hari, memotong rumput atau menjadi pembantu rumah tangganya.

Jadi sudah jelas bahwa proses hegemoni yang dilakukan oleh raja terhadap kawulanya hanya untuk kepentingan raja. Sementara kawula di perintah sesuka hatinya. Mereka dipaksa untuk melayani kepentingan penguasa mulai dari urusan yang paling kecil seperti jaga rumah atau cari rumput sampai urusan membiayai kerajaannya dengan membayar pajak. Sederhananya wong cilik (kawula) hidup dan bekerja bukan untuk mereka sendiri tapi untuk raja dan penguasa lainnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa pada masa kerajaan di Jawa terdapat adanya kemungkinan yang cukup besar atas munculnya sebuah

¹⁰ Kontowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, hlm. 219

realitas kemiskinan walaupun sampai saat ini masih sulit untuk menghitung secara matematis.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan hubungan ekonomi antara priyayi dan wong cilik terdapat pola hubungan yang eksploitatif dan bersifat menindas, sehingga memakmurkan raja, sementara petani diperas tenaganya dan sengsara. Sebab dalam hubungan ini aliran ekonomi (hasil bumi) lebih banyak ke atas (pihak raja), sedang aliran ke bawah (petani) sedikit sekali. Dan juga dapat di temukan dengan mudah dalam masyarakat feodal adanya selubung budaya yang menganggap bakti pada raja sebagai bakti pada Tuhan. Pemerasan tenaga petani merupakan kewajiban suci kepada wakil Tuhan di dunia (raja)¹¹.

Persoalan ini ternyata tidak berakhir ketika kolonial belanda datang ke Indonesia. Malah, kolonial menggunakan perangkat kekuasaan yang telah ada untuk mencapai kepentingannya di Indonesia. Kolonial bekerja sama dengan bangsawan-bangsawan lokal untuk menindas rakyat jelata (wong cilik). Para digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bangsawan ini bersekutu dengan belanda karena di beri keuntungan dari di terapkannya *culture stelsel* (tanam paksa). Para priyayi ini akhirnya mendukung kepentingan belanda. Bagi para priyayi ini mengabdikan pada Ratu Belanda menjadi kehormatan tertinggi, sebagaimana dulu mengabdikan pada sesuhunan. Dan hegemoni budaya terhadap wong cilik ini menjadi suatu keharusan bagi penguasa di Jawa entah raja, kolonial, Soekarno atau pun Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Dapat kita lihat pada era

¹¹ Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 17

soekarno yang di ceritakan ia adalah putra kandung pakubuwono ke-x dan keturunan kalijogo. Ia di hubungkan dengan ratu adil, tokoh utama dalam millenarisme jawa. Seiring dengan proses hegemoni itu soekarno tidak bisa mengangkat rakyatnya. Kemiskinan dan pengangguran ada di mana-mana, bahkan pangan hilang dari pasaran, harga barang begitu mahal serta inflasi melonjak tinggi untuk mengurangi kekurangan itulah soekarno mengambil cerita yang intinya mengagungkan dirinya di tengah kesengsaraan rakyat.

Demikian pula pada waktu soeharto, untuk bisa menghegemoni, maka ia mengambil beberapa cara untuk melegitimasi kekuasaannya dengan menggunakan simbol-simbol kejawen. Misalnya ia selalu memakai blankon membuat tugu yang bentukannya seperti “lidah api” emas (citra wahyu). Banyak menyimpan benda-benda kuno yang kesemuanya ini mencerminkan bahwa soeharto adalah panggung kekuasaannya yang direstui oleh para dewa. Soeharto adalah keturunan para penguasa jawa. Padahal di sisi lain soeharto juga memiskinkan rakyat Indonesia dengan model pembangunan yang tidak berorientasi pada pemerataan tapi hanya pada pertumbuhan.

C. Fenomena Kemiskinan dalam Masyarakat Jawa

Dalam sejarah masyarakat jawa secara sosio-ekonomi masyarakat di klasifikasikan menjadi dua yaitu priyayi dan wong cilik. Priyayi yang kebanyakan adalah para penguasa jawa terlepas pangkatnya rendah atau tinggi. Mereka selalu berupaya melestarikan kekuasaan dan kekayaannya dengan

menindas wong cilik yang kebanyakan adalah petani atau hamba keraton. Salah satu cara untuk melestarikan proses penindasannya adalah dengan mengagungkan penguasa entah berbentuk cerita atau symbol-simbol lainnya. Dengan kata lain memunculkan *superioritas* penguasa dengan membuat wong cilik menjadi bersifat *inferior*. Dengan lemahnya mental wong cilik maka akan semakin mudah bagi penguasa jawa untuk memenuhi kepentingannya, karena wong cilik sedikit banyak akan terpengaruh oleh budaya yang diciptakan oleh penguasa. Wong cilik akan merasa bahwa kondisi mereka adalah takdir dari Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh siapa pun, pengabdian kepada penguasa adalah suatu keharusan tanpa memikirkan imbalannya.

Selubung budaya yang dilakukan oleh penguasa jawa ini menutupi perilaku penguasa jawa yang bersifat *eksploitatif* dan menindas. Petani yang bekerja keras di sawah tidak bisa hidup secara layak karena hasil taninya sebagian besar di serahkan kepada penguasa atau ia hanya bekerja sebagai penggarap tanahnya penguasa. Dalam kondisi seperti inilah maka, petani (wong cilik) dalam kehidupannya selalu berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini juga di perparah dengan banyaknya waktu yang mereka gunakan untuk mengabdikan pada penguasa semisal menjaga rumah atau mencari rumput untuk kepentingan penguasa.

Kemiskinan yang dialami oleh orang jawa tidak seratus persen diakibatkan oleh pandangan hidupnya. Karena ada pula orang gede yang punya pandangan hidup seperti itu malah jadi penguasa. Kemiskinan yang dialami

wong cilik di Jawa lebih disebabkan karena faktor lemahnya akses ekonomi dan politik. Banyak buruh tani yang bekerja pada tuan tanah atau petani kecil yang selalu dipaksa untuk membayar upeti kepada penguasa dengan bentuk pajak serta penguasa Jawa dengan kekuasaan politiknya berwenang mengatur semua kehidupan wong cilik. Dan ini diperparah dengan desakkannya pandangan hidup dan melakukan selubung budaya. Pandangan hidup yang tidak membuat wong cilik memahami kenyataan yang sebenarnya. Tetapi, pandangan hidup yang mensyahkan praktek penindasan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Sedangkan hubungan ekonomi antara priyayi dan wong cilik terdapat pola hubungan yang eksploitatif dan bersifat menindas, sehingga memakmurkan raja, sementara petani diperas tenaganya dan sengsara. Sebab dalam hubungan ini aliran ekonomi (hasil bumi) lebih banyak ke atas (pihak raja), sedang aliran ke bawah (petani) sedikit sekali. Dan juga dapat ditemukan dengan mudah dalam masyarakat feodal adanya selubung budaya yang menganggap bakti pada raja sebagai bakti pada Tuhan. Pemerasan tenaga petani merupakan kewajiban suci kepada wakil Tuhan di dunia (raja).

Kondisi di atas diperparah dengan adanya persekutuan kepentingan antara kolonial dengan penguasa Jawa telah mengakibatkan kemiskinan, dengan ditanamkannya sistem *cultur stelsel* telah memperparah kondisi petani (wong cilik), meskipun struktur masyarakat berubah tetapi masyarakat Jawa tidak ada orang yang tidak miskin. Kebanyakan rakyat Jawa dipaksa Belanda bekerja dengan kesejahteraan yang minim. Mereka di kasih sandang dan papan

seadanya tanpa melihat kelayakan. Tanah rakyat jawa dikuasai oleh belanda, walaupun ada masyarakat jawa yang menanam itu pun atas perintah belanda dan tanamannya yang di tanam harus di serahkan kepada belanda dengan harga yang sangat murah. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kesejahteraan petani sangat terabaikan kemiskinan petani juga diperparah oleh pandangan hidup yang menutupi semua perilaku penguasa jawa yang menindas serta penguasa yang tidak pernah berpihak pada petani (wong cilik) dari dulu sampai sekarang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Secara umum dapat kita simpulkan bahwa pandangan hidup dan budaya orang Jawa tidak mencerminkan suatu pandangan dan budaya yang progresif (maju). Pandangan yang banyak dihiasi oleh mitos dan cerita-cerita mistik yang membentuk sikap yang pasif. Pasrah dalam menghadapi cobaan, *nrimo ing pandum* dan lebih suka mengalah dari setiap persoalan adalah bentuk dari pada sebuah sikap yang lebih mengedepankan harmonitas, serasi dan seimbang di tengah-tengah suasana yang penuh kontradiksi. Masyarakat Jawa memandang keseimbangan antara *mikro kosmos* dan *makro kosmos* harus terjaga. Hierarki ini telah melegitimasi kekuasaan Raja sebagai wakil Dewa yang harus di junjung tinggi dan di patuhi. Ini bisa kita lihat pada ungkapan orang Jawa *nrimo ing pandum*, luwih apik ngalah tinimbang musuhan (lebih baik mundur daripada bertengkar). Selain itu masyarakat Jawa juga lebih suka mengandaikan perlakuannya pada hal-hal yang bersifat irrasional.

Munculnya pandangan hidup dan budaya orang Jawa itu bukanlah lahir secara kebetulan. Secara histories penguasa Jawa (raja) mewakili golongan bangsawan berupaya menanamkan system nilai dan budaya yang searah dengan kepentingannya. Melalui pujangga atau mpu, para raja memanipulasi kesadaran

wong cilik dengan mengkultuskan dirinya sebagai wakil dari dewa. Banyak syair atau kitab yang di buat untuk melegitimasi kekuasaan raja, seperti kitab *nagarakartagama*, *sutasoma*, *babad tanah jawi*. Dalam kitab itu banyak di ceritakan kelebihan dan keistimewaan suatu kesaktian raja dan kebanyakan raja mengklaim dirinya sebagai titisan dewa atau utusan Tuhan. Seiring dengan penciptaan system yang hegemoni itu, penguasa jawa (raja) melakukan penghisapan dan penindasan kepada wong cilik yang kebanyakan bekerja sebagai petani atau buruh tani. Untuk memenuhi kepentingannya sebagai penguasa, petani di paksa bekerja di tanah mereka tanpa upah ataupun di paksa untuk membayar pajak (upeti).

Melalui penciptaan system nilai atau budaya yang searah dengan kepentingan penguasa jawa maka penguasa akan mendapatkan seluruh pembenarannya. Sementara itu wong cilik yang terpengaruh oleh nilai dan budaya itu akan pasrah dan cenderung menerima apa adanya karena menganggap ini adalah takdir Tuhan (dewata) yang harus diterima. Pandangan hidup dalam masyarakat yang tidak progresif adalah hasil reproduksi kerajaan (negara) tradisional yang ada di jawa untuk melanggengkan *status quonya* atas wong cilik (petani).

Secara historis bahwa persoalan kemiskinan yang di alami oleh masyarakat jawa terutama wong cilik yang kebanyakan bekerja sebagai petani dan buruh tani telah menjadi objek pengambilan upeti. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dirinya tidak mencukupi. Kemiskinan yang terjadi di jawa

lebih di sebabkan oleh minimnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik. Monopoli tanah yang dilakukan oleh penguasa Jawa entah, raja, pemerintah kolonial maupun pemerintahan sekarang ini menjadi penyebab utama mengapa masyarakat kecil di Jawa masih dililit persoalan kemiskinan, sementara struktur politik yang di bangun malah berpihak pada penguasa ekonomi dalam melakukan perdagangan. Kemiskinan structural inilah yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan. Pandangan hidup dan budaya masyarakat Jawa dalam hal ini hanya menjadi faktor pendukung terpeliharanya proses kemiskinan.

B. Saran-saran

Dalam melihat realitas yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat hendaknya kita tidak hanya mengungkap persoalan yang muncul di permukaan, tetapi juga menganalisis lebih jauh tentang realitas itu. Munculnya realitas, siapa yang melahirkan dan berpihak pada siapa realitas social yang terjadi.

Hegemoni budaya adalah sisa penindasan intelektual yang kadang membuat masyarakat berfikir dan bertindak secara irrasional. Maka harus ada sebuah *counter hegemoni* yang mampu menjadi ruang alternatif berkembangnya pemikiran yang lebih maju, entah dengan bentuk apapun.

Kemiskinan yang melekat pada masyarakat Jawa adalah persoalan turun temurun yang sampai saat ini belum bisa di pecahkan secara maksimal. Seringkali penyebabnya diletakkan pada orang yang miskin, hal ini tentu menjadikan si miskin pada suatu posisi yang terdiskriminasikan. Padahal

kemiskinan di Jawa disebabkan timpangnya struktur masyarakat secara ekonomi dan politik. Untuk itu dalam melihat persoalan ini, hendaknya para pekerja social atau teori-teori social bisa membangun sebuah konsep yang lebih progresif dan radikal dalam memahami dan memecahkan persoalan ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- A.E Priyono dan Asmar Oemar Saleh, *Krisis Ilmu-Ilmu Social Dalam Pembangunan Di Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: PLP2M, 1984)
- Alan Gilbert dan Josef Gugler, *Urbanisasi dan Kemiskinan Di Dunia ke Tiga*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996)
- Aprianus Salam, *Umar Kayam dan Jaring Simiotik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998).
- Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ke Tiga*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995)
- Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1966)
- Budiono Herusatoto, *Symbolisme dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Hanindita, 1991)
- Darmanto Jatman, *Psikologi Jawa*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997)
- Dennys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)
- Emil Salim, *Percencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984)
- Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa*, (Jakarta: Gramedia, 1984)
- Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa*, (Jakarta: Gramedia, 2001)
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1992)
- Jakob Sumarjo, *Arkeologi Budaya Indonesia*, (Yogyakarta: Qalam, 2002)
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)

- Koentjoroningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995)
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1993)
- M. Munandar Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002)
- Marbangun Hardjowirogo, *Manusia Jawa*, (Jakarta: Idayu Press, 1984)
- Maria A. Sarjono, *Paham Jawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995)
- N. Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Nat C. Colleta dan Umar Kayam, *kebudayaan dan Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987)
- Niels Mulder, *Kebatinan dan Kehidupan Sehari-hari Orang Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982)
- Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1973)
- Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Parsudi Suparlan, *kemiskinan Di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995)
- Paul B. Harto dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid II*, (Jakarta: Erlangga, 1990)
- Peter L Berger, *Piramida Pengorbanan Manusia*, (Bandung: Iqro', 1982)
- Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, (Jakarta: Teraju, 2003)
- Soejamto, *Reorientasi dan Revitalisasi Pandangan Hidup Jawa*, (Semarang: Dahara Prize, 1997)
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)